



PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI DAERAH JAWA TENGAH



Direktorat
Kebudayaan

6

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
1994/1995

**PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DI DAERAH JAWA TENGAH**

306.826

AGU

P

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
1994/1995**

**PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DI DAERAH JAWA TENGAH**

TIM PENELITI

**KETUA : Drs. AGUS DONO KARNADI
ANGGOTA : Dra. ENDANG SUSILOWATI, MA
JB. TJOEK SOEWARNO, BA
Drs. WAHONO**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA
JAWA TENGAH
1994/1995**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN

NO. TERIMA	03-01-00
NO. CATAT	03-01-00
NO. INDIK	927/00
NO. CLASS	370.19. PER.
KOPILAH	2

KATA PENGANTAR

Penerbitan buku tentang Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1994/1995 yang berjudul "PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI DAERAH JAWA TENGAH".

Naskah ini merupakan hasil penelitian dari Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1992/1993. Penerbitan Penggandaan buku tersebut merupakan upaya dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian dan perekaman kebudayaan daerah yang sangat tinggi nilainya.

Dengan terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala hal, mulai dari tahap penelitian, tahap editorial dan penyesuaian bahasa. Penyusunan buku ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kami dalam segala hal.

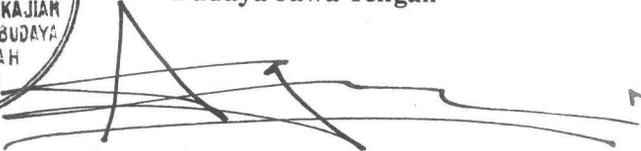
Oleh karena itu demi kesempurnaan kami mohon saran dan koreksi para pembaca yang budiman.

Akhirnya kami berharap buku ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat dijadikan daya rangsang dan masukan untuk penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

Semarang, 20 Oktober 1994



Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian
dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya Jawa Tengah


Drs. AGUS DONO KARNADI
NIP. 130932236

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya hasil penelitian Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1994/1995 dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya serta merupakan upaya pelestarian kebudayaan daerah.

Harapan saya semoga dengan diterbitkannya hasil Penelitian ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik untuk dapat mengetahui lebih jauh informasi budaya melalui hasil penelitian ini. Dengan belajar dan memahami berbagai informasi budaya daerah diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kecintaannya terhadap budayanya sendiri, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat jatidiri kita.

Di samping hal-hal sebagaimana tersebut di atas juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dalam menangkal pengaruh negatif budaya asing.

Saya berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembinaan dan pengembangan budaya bangsa.

Akhirnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Semarang, 20 Oktober 1994

Kepala Kantor Wilayah.



DR. KOESNO
NIP. 13009890

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENELITI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PETA.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	2
1.3. Batasan Konsep	2
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Metode dan Teknik Penelitian.....	7
1.6. Organisasi Tulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	13
2.1. Lokasi Penelitian	13
2.2. Keadaan Alam	14
2.4. Pendidikan.....	17
2.5. Ekonomi	21
2.6. Agama dan Kepercayaan.....	22
BAB III Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan Nasional	25
3.1. Di Lingkungan Pendidikan Formal	27
3.2. Di Lingkungan Pendidikan Nonformal	30
BAB IV PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL	33
4.1. Melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Formal	33
4.1.1. Pada SLTA.....	33
4.1.2. Pada Peruruan Tinggi	36
4.2. Melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Nonformal	38
4.2.1. Pada Lembaga Koperasi	38
4.2.2. Pada Lembaga Pasar	38
4.2.3. Pada Lembaga Perusahaan swasta	40
4.2.4. Pada Lembaga Pemerintah	41
4.2.5. Pada Lembaga Keagamaan	43

BAB V ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN	
ANALISIS.....	45
5.1. Karakteristik Responden	45
5.2. Dimensi Kognisi.....	48
5.3. Dimensi Afeksi.....	52
5.4. Dimensi Psiko-Motorik	63
KESIMPULAN	78
SARAN.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	79
DAFTAR INFORMAN	81
FOTO TEMPAT PENDATAAN	83

DAFTAR PETA

PETA

	Hal.
1. Peta Propinsi Jawa Tengah.....	18
2. Peta Kotamadia Surakarta.....	19
3. Peta Wilayah Kecamatan Jebres.....	20

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel II.1 Penduduk Kodia, Surakarta	15
Tabel II.2. Kepadatan Penduduk di Kodia Surakarta	16
Tabel II.3. Data Sekolah, Murid dan Guru	21
Tabel II.4. Data Penganut Agama	23
Tabel V.1. Latar Belakang Kelamin Responden	45
Tabel V.2. Latar Belakang jenis kelamin menurut Status Lembaga Pendidikan Responden	45
Tabel V.3. Komposisi persentase jenis kelamin menurut Status Lembaga Pendidikan Responden	45
Tabel V.4. Distribusi Prekuensi Usia Responden	46
Tabel V.5. Latar Belakang Agama Responden	46
Tabel V.6. Latar Belakang Pendidikan Responden	47
Tabel V.7. Tempat Lahir Responden	47
Tabel V.8. Pekerjaan Orang Tua Responden	48
Tabel V.9. Jawaban Tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "Pancasila"	48
Tabel V.10. Jawaban Tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "Pancasila" menurut status lembaga Pendidikan Responden	49
Tabel V.11. Jawaban Responden tentang arti kata 'Pancasila" secara harafiah	49
Tabel V.12. Jawaban terhadap arti kata "Pancasila" menurut status Lembaga Pendidikan Responde	50
Tabel V.13. Jawaban Tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "P-4"	50
Tabel V.14. Jawaban tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "P-4" menurut status Lembaga Pendidikan Responden	51
Tabel V.15. Jawaban tentang Tingkat Pemahaman Responden terhadap "P-4"	51
Tabel V.16. Jawaban tentang Tingkat Pemahaman Responden terhadap "P-4" menurut status Lembaga Pendidikan Responden	52
Tabel V.17. Jawaban mengenai Tingkat Keterbukaan Responden dalam memilih sahabat yang berbeda Golongan Agama	53

Tabel V.18.	Jawaban mengenai Tingkat Keterbukaan Responden dalam memilih sahabat yang berbeda Gol. Agama menurut status Pendidikan Responden.....	53
Tabel V.19.	Jawaban Responden tentang rasa wajib membantu orang yang ditimpa bencana meskipun berbeda kebangsaan	54
Tabel V.20.	Jawaban Responden tentang rasa wajib membantu orang yang ditimpa bencana meskipun berbeda kebangsaan, menurut status lembaga Pendidikan Responden.....	55
Tabel V.21.	Sikap Responden dalam menanggapi usul yang bermanfaat bagi kemajuan kelurahan dari orang yang berbeda agama dan suku bangsa.....	56
Tabel V.22.	Sikap responden dalam menanggapi usul yang bermanfaat bagi kemajuan kelurahan, dari orang yang berbeda agama dan suku bangsa, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.....	56
Tabel V.23.	Pendapat Resonden tentang Koperasi sebagai wadah ekonomi yang mengutamakan semangat kekeluargaan dan Gotong Royong	57
Tabel V.24.	Pendapat Responden tentang Perbuatan Amal terhadap Fakir miskin sebagai perbuatan terpuji.....	57
Tabel V.25.	Pendapat Responden tentang Perbuatan Amal terhadap fakir miskin sebagai perbuatan terpuji, menurut Lembaga Pendidikan Responden	58
Tabel V.26.	Pilihan Responden tentang Cara Mencari Nafkah Paling sesuai dengan keadaan masa kini.	58
Tabel V.27.	Pilihan Responden tentang cara mencari Nafkah Paling sesuai dengan keadaan masa kini, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.....	59
Tabel V.28.	Sikap responden terhadap ketenaran Bali di Manca negara.....	60
Tabel V.29.	Sikap responden terhadap ketenaran Bali di Manca negara, menurut Lembaga Pendidikan Responden.....	60
Tabel V.30.	Sikap Responden terhadap ketinggian mutu Budaya Bali	60
Tabel V. 31.	Sikap responden terhadap ketinggian mutu Budaya Bali, menurut Status Lembaga Pendidikan Responden.....	61
Tabel V.32.	Pendapat Responden tentang perlunya Pelestarian Bahasa Daerah.....	61

Tabel V.33. Alasan Responden tentang Pelestarian Pengembangan Bahasa Daerah, menurut Status Lembaga Pendidikan Responden	62
Tabel V.34. Responden yang memiliki sahabat yang berbeda Agama	63
Tabel V.35. Responden yang memiliki sahabat yang berbeda agama, menurut status pendidikan Responden.....	64
Tabel V.36. Partisipasi Responden dalam kegiatan sosial (kerja bakti) di lingkungan RT/RW/Kelurahan	65
Tabel V.37. Tingkat Partisipasi Responden dalam kegiatan sosial, menurut status lembaga Pendidikan Responden.....	65
Tabel V.38. Keanggotaan Responden dalam satu atau Lebih organisasi	66
Tabel V.39. Keanggotaan Responden dalam satu atau lebih organisasi, menurut Lembaga Pendidikan Responden	66
Tabel V.40. Cara pengambilan Keputusan dalam menyusun Program.....	67
Tabel V.41. Cara pengambilan keputusan dalam menyusun program, menurut status lembaga pendidikan responden	67
Tabel V.42. Cara pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah....	68
Tabel V.43. Cara pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah, menurut status Lembaga Pendidikan Responden	68
Tabel V.44. Konflik dengan kerabat/tetangga	68
Tabel V.45. Tingkat Intensitas konflik dengan Kerabat/Tetangga	69
Tabel V.46. Tingkat Intensitas konflik dengan Kerabat/tetangga, menurut status Lembaga Pendidikan Responden	69
Tabel V.47. Jenis konflik menurut status lembaga Pendidikan Responden.....	69
Tabel V.48. Cara penyelesaian konflik, menurut status Lembaga Pendidikan Responden	70
Tabel V.49. Konflik dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan.....	70
Tabel V.50. Konflik dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan, menurut status lembaga pendidikan responden.....	70
Tabel V.51. Jenis konflik Menurut Status Lembaga Pendidikan Responden.....	71

Tabel V.52. Cara penyelesaian konflik, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.....	71
Tabel V.53. Konflik di lingkungan Organisasi Menurut Status Lembaga Pendidikan Responden	72
Tabel V.54. Konflik di lingkungan organisasi, menurut Status Lembaga Pendidikan Responden.....	72
Tabel V.55. Jenis konflik di lingkungan organisasi menurut status Lembaga Pendidikan Responden	72
Tabel V.56. Cara penyelesaian konflik di lingkungan Organisasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.....	73
Tabel V.57. Keanggotaan dalam koperasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.....	74
Tabel V.60. Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan Pekerjaan/Sekolah/Organisasi	75
Tabel V.61. Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan pekerjaan/sekolah/organisasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden	75
Tabel V.62. Penggunaan Bahasa Indonesia di rumah	76
Tabel V.63. Tingkat Intensitas Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan rumah, menurut Status Lembaga Pendidikan Responden.....	76
Tabel V.64. Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia di rumah, menurut status Lembaga Pendidikan Para Responden.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah Penelitian

Kemajemukan suatu masyarakat, seperti yang tampak dalam masyarakat kita, mengimplikasikan kemajemukan masalah. Baik yang dihadapi oleh para warganya pada umumnya, maupun yang dihadapi oleh pemerintahnya pada khususnya; baik yang bersifat personal, sosial, maupun kultural. Hal yang demikian dikarenakan perbedaan sosial budaya yang memang tajam dalam masyarakat majemuk cenderung melibatkannya perbedaan orientasi dan kepentingan. Pada gilirannya, perbedaan tersebut dapat direkayasa oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alasan untuk konflik. Memang dalam kenyataannya, masyarakat majemuk amat rawan terhadap masalah integrasi. Pemecahan masalah ini merupakan prasyarat bagi kehidupan bersama dalam upaya mencapai cita-cita bersama.

Kita menyadari akan usia muda bangsa dan negara kita yang *bhineka*. Kemungkinan loyalitas primordial mengalahkan kepentingan nasional masih terbuka (Alfian, 1985: 157). Dalam kondisi yang demikian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan ekonomi, yakni faktor-faktor yang menentukan kekuatan politik suatu bangsa masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Dalam hal ini ialah suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan tingkat ketergantungan kita kepada negara-negara donor (ST. Alisyahbana, 1985: 148-149). Sementara itu, arus globalisasi berpotensi mengancam kerapuhan identitas bangsa.

Dilihat secara demikian, maka masalah yang paling mendasar yang dihadapi bangsa kita adalah masalah pengembangan kebudayaan nasional. Hal itu penting sebab, menurut Koentjaraningrat (1985: 111), kebudayaan nasional memiliki dua fungsi yang integratif: (1) sebagai sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia, dan (2) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang *bhineka* itu, untuk saling berkomunikasi. Sehingga dengan demikian dapat memperkuat solidaritas nasional. Pentingnya masalah ini telah disadari oleh para cerdik cendekia kita sebelum masa kemerdekaan, meskipun pembahasannya secara sistematis baru diselenggarakan setelah masa revolusi melalui kongres-kongres kebudayaan (Sapardi Djoko Damono, 1987: 1-2).

Pengembangan kebudayaan nasional tentu saja bukan hanya menjadi urusan para cendekiawan dan pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh

warga negara Indonesia. Agar seluruh warga dapat menginternasialisasi unsur-unsur kebudayaan nasional, dan pada gilirannya dapat mewujudkannya dalam tingkah laku dan dalam bentuk hasil karya, maka diperlukan upaya-upaya pembinaan. Upaya-upaya pembinaan ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan di luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan, maupun pendidikan dalam keluarga. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa (Tap MPR No. II/1988).

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: sejauh mana sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal, berperan dalam upaya pembinaan kebudayaan nasional.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) memantau tingkat internalisasi penduduk terhadap nilai-nilai Pancasila;
- (2) mengumpulkan data tentang pola-pola penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah;
- (3) memberi masukan bagi pemerintah berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka penyusunan strategi pengembangan kebudayaan nasional lebih lanjut.

1.3. Batasan Konsep

"Kebudayaan" dan "kebudayaan nasional" merupakan konsep-konsep yang bermakna luas, karena itu perlu dibatasi. Kebudayaan menurut para ahli, memiliki dua dimensi, yaitu dimensi wujud dan dimensi isi. Honigman membagi dimensi pertama dalam tiga bagian: (1) sebagai perangkat ide, yaitu wujud kebudayaan yang tidak tampak oleh mata karena berlokasi di dalam kepala para pendukungnya, atau yang sering disebut sebagai sistem budaya (*cultural system*); (2) sebagai perangkat aktivitas, yaitu wujud kebudayaan berupa tingkah laku yang berpola, yang dapat diamati, atau yang sering disebut sebagai sistem sosial (*social system*); dan (3) sebagai perangkat artefak, yaitu wujud kebudayaan yang paling konkret yang berupa benda-benda hasil ciptaan manusia, atau yang sering disebut sebagai kebudayaan fisik (*physical culture*) atau kebudayaan material (*material culture*). Sementara itu Kluckhohn mengemukakan adanya tujuh unsur kebudayaan Universal dalam dimensi kedua: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencarian hidup, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian (Koentjaraningrat, 1985: 99 - 104).

Mengenai kebudayaan nasional, kita menjumpai berbagai rumusan

dari berbagai ahli. Menurut Ki Hadjar Dewantoro, Kebudayaan Nasional adalah: "segala sari-sari dan puncak-puncak segala kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang asli maupun yang baru yang berjiwa nasional" (Sapardi Djoko Damono, 1987: 10); Umar Kayam mendefinisikannya sebagai "kebudayaan baru dari bangsa yang baru yang sedang meninggalkan kebudayaan pertanian-tradisi-feodal; yang terus menerus merumuskan berbagai pernyataan budaya di segala bidang untuk dapat menjawab dengan cerdas dan kreatif tantangan budaya industri dan perdagangan" (Umar Kayam, 1991: 11). Sedangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kebudayaan nasional adalah "Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya.... Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Meskipun dirumuskan secara berbeda-beda namun, yang pasti kebudayaan nasional dipahami sebagai sesuatu yang mengatasi nasion-nasion lama dan yang berorientasi ke depan, sehingga dengan demikian "berjiwa nasional", "yang terus menerus merumuskan berbagai pernyataan budaya di segala bidang", dan "yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing"; atau, sebagaimana yang tercantum dalam GBHN (Tap MPR No. II/MPR/1988), "yang berlandaskan Pancasila, yang merupakan perwujudan cipta, rasa dan karša bangsa Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberi wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa".

Koentjaraningrat yang memperjelas konsep kebudayaan nasional dengan rincinya ke dalam deretan unsur menurut dua fungsi. Dalam hal ini yakni uncur-unsur yang berfungsi sebagai pemberi identitas Indonesia dan unsur-unsur yang berfungsi sebagai wahana komunikasi dan penguat solidaritas nasional. Kategori pertama terdiri atas unsur bahasa (bahasa nasional Indonesia dan bahasa-bahasa daerah), unsur teknologi (teknologi arkeologi dan prahistori, arsitektur tradisional), unsur organisasi sosial (organisasi adat untuk mengelola irigasi di Bali, tata krama adat), unsur sistem pengetahuan (ilmu obat-obatan tradisional), dan unsur kesenian (seni tekstil tradisional, seni relief dan ukir, seni arsitektur, seni rias, seni lukis tradisional, seni suara tradisional, seni rias, seni lukis tradisional, seni suara tradisional, seni tari tradisional, dan seni masak). Kategori kedua terdiri atas unsur bahasa (bahasa nasional Indonesia), unsur ekonomi (pengelolaan gaya Indonesia),

unsur organisasi sosial (ideologi Pancasila, hukum nasional, tata krama nasional), dan unsur kesenian (seni lukis masa kini, seni sastra dalam bahasa nasional, seni drama masa kini termasuk seni film) (Koentjaraningrat, 1985: 115).

Dengan sudut pandang yang holistik, Sartono Kartodirdjo menyempurnakan konsep kebudayaan nasional ini. Menurut ahli sejarah ini, Kebudayaan nasional merupakan kompleksitas unsur-unsur yang terintegrasi, ketimbang hanya agregasi unsur-unsur. Faktor yang menjiwai, memberi corak khusus ataupun gaya adalah apa yang disebut etos. Etos dapat dipandang sebagai faktor yang meresap dalam kompleksitas kebudayaan sehingga dapat menciptakan suatu koherensi antara pelbagai unsur, selanjutnya “menjiwainya” sehingga menimbulkan struktur tersendiri dengan identitas tersendiri pula. Dengan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara maka seharusnya kita mengorientasikan kebudayaan nasional menurut penyusunannya yang berdasarkan etos Pancasila; bagaimana butir-butirnya dapat diresapkan kedalam pelbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia sehingga timbul suatu proses integrasi unsur-unsurnya. Di sini Pancasila ditempatkan dalam kedudukan sebagai etos kebudayaan nasional (Sartono Kartodirdjo, 1985: 20).

Penekanan yang sama dikemukakan oleh Harry Tjan Silalahi, bahwa kebudayaan nasional bersifat kenusantaraan yang terwujud dalam *bhineka tunggal ika*. Kebhinekaan adalah kekayaan yang tetap diakui sepanjang dalam kerangka ketunggalikaan yang berdasarkan Pancasila. Dari Pancasila, dalam Pancasila, dan melalui Pancasila itulah hakikat kebudayaan nasional Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai wadah dan isi kebudayaan nasional, Pancasila juga bertugas untuk menentukan pilihan-pilihan objek yang pantas dipergunakan untuk tidak saja memperkaya kebudayaan nasional, tetapi yang lebih penting adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Harry Tjan Silalahi, 1991: 16 - 17).

Selanjutnya, menurut H.A.R. Tilaar, antara kebudayaan dan pendidikan terdapat hubungan yang timbal balik. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membudaya. Dalam proses itu, pendidikan bukan sekedar mentransfer nilai-nilai yang hidup dalam tradisi, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan budaya yang ada, dan mengantisipasi nilai-nilai yang mungkin muncul di masa depan (1991: 16). Dalam konteks nasional, fungsi pendidikan nasional memiliki peran ganda: (a) dalam segala kegiatannya sistem pendidikan nasional haruslah berdasarkan pada kebudayaan nasional, dan (b) sekaligus mengembangkan kebudayaan nasional itu sendiri (1991: 9). Penegasan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 bahwa pen-

didikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rumusan tujuan nasional dengan jelas ditekankan bahwa Pembangunan nasional kita bukan sekedar mencapai masyarakat yang secara ekonomis dan material maju serta berkeadilan, tetapi juga suatu masyarakat yang maju dan bersatu. Azas kesatuan dan persatuan bangsa ini merupakan nilai yang perlu dibudayakan melalui proses pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai budaya ini — yaitu yang bersumber dari Pancasila — tidak akan timbul dengan sendirinya tetapi merupakan kegiatan yang intensional tercermin dalam seluruh situasi pendidikan nasional, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (H.A.R. Tilaar, 1991: 8).

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada ”peranan pendidikan, baik yang formal maupun nonformal, dalam pembinaan Pancasila”. Di sini Pancasila dipandang sebagai salah satu unsur inti dari kebudayaan nasional. Dari dimensi wujud, Pancasila merupakan perangkat ide, atau sistem budaya yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi orientasi dan pedoman bagi tingkah laku manusia Indonesia dalam segala bidang kehidupannya. Sementara dari segi dimensi Isi, Pancasila merupakan unsur organisasi sosial dalam pengertian sebagai ideologi negara yang berfungsi untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang bhineka.

Selanjutnya penelitian ini juga akan menyorot soal pola penggunaan bahasa nasional dan bahasa daerah. Hal itu penting, sebab bahasa menurut para ahli (lihat misalnya: E.K.M. Masinambow, 1985: 181; S. Djawanai, 1985: 192-193), merupakan pencerminan dan pengejawantahan suatu sistem budaya. Dalam konteks nasional, bahasa nasional — yaitu bahasa Indonesia — dapat berfungsi pula sebagai pemberi identitas bangsa Indonesia dan sebagai wahana komunikasi dan penguat solidaritas nasional *dalam bentuk yang paling konkret*. Meskipun bahasa daerah hanya memenuhi fungsi pertama dari kebudayaan nasional — yaitu sebagai pemberi identitas bangsa Indonesia namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R. Tilaar, bahasa daerah mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang bhineka dengan sub-sub kebudayaannya yang kaya, yang justru menjadi fondasi dari kebudayaan nasional itu sendiri (1991: 10). Dalam penjelasan pasal 36 UUD 1945 dinyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik akan dihormati dan dipelihara oleh negara.

Pembinaan Pancasila, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah ini akan

ditelusuri pada lembaga-lembaga pendidikan formal dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal. Kategori pertama meliputi sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan lembaga pendidikan tinggi (sekolah tinggi, akademi dan universitas) baik yang negeri maupun yang swasta. Sementara kategori kedua meliputi lembaga-lembaga pemerintah (kantor-kantor pemerintah, koperasi, dan pasar), lembaga-lembaga swasta (perusahaan-perusahaan swasta), dan lembaga-lembaga keagamaan (pesantren dan gereja).

Sebenarnya kantor-kantor pemerintah lebih menjalankan fungsi pranata birokrasi, sedangkan koperasi, pasar, dan perusahaan-perusahaan swasta lebih menjalankan fungsi pranata ekonomi daripada fungsi pranata pendidikan. Meskipun demikian, dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat perangkat aturan yang bersumber dari kebudayaan nasional yang ditujukan untuk membina sikap mental para pegawai dan karyawannya, termasuk para pimpinannya, agar mencerminkan nilai-nilai budaya nasional, khususnya nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan P-4, misalnya, merupakan contoh konkret dari pelaksanaan perangkat aturan tersebut.

Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga ini terutama menyelenggarakan fungsi-fungsi pranata agama. Namun dalam berbagai aktivitas lembaga-lembaga ini tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah yang diciptakan untuk, antara lain, menjamin stabilitas nasional. Sebagaimana kita ketahui, masalah agama merupakan masalah peka bagi negara manapun, yang tidak jarang mengundang konflik yang berkepanjangan. Di Indonesia masalah ini dipecahkan melalui pengembangan sikap toleran dan sikap saling menghormati antar umat yang berbeda agama. Hal ini jelas merupakan upaya pembinaan nilai-nilai budaya nasional sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut (kantor pemerintah, koperasi, pasar, perusahaan swasta, pesantren, dan gereja) turut pula menyelenggarakan fungsi pranata pendidikan. Oleh karena itu, secara teknis, dalam penelitian ini kita dapat menggolongkannya sebagai lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal.

Pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah baik dalam bidang teori maupun praktek, yang diselenggarakan secara sistematis dan metodelis, memang hanya kita temui dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Andaikata kita menemui individu-individu yang dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan baik dan benar, sudah tentu kemampuan itu diperoleh dari bangku sekolah. Kita bisa menemukan perangkat

aturan, apakah dalam bentuk tulisan ataupun lisan, yang mewajibkan para pegawai dan karyawan, termasuk para pimpinannya, untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sesuai dengan arena sosialnya (misalnya bahasa Indonesia harus digunakan dalam arena nasional atau dalam kesempatan resmi). Pada tingkat ini kita bisa berbicara tentang pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan nonformal tersebut.

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data jenis pertama diperlukan guna mendeskripsikan aspek-aspek yang terkait dalam proses pembinaan moral Pancasila. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) materi pengajaran Pancasila (PMP dan P-4), (2) metode pengajaran, (3) jumlah jam pelajaran, (4) sistem evaluasi, (5) kontrol sosial pihak lembaga, dan (6) kondisi-kondisi sosial yang turut menunjang proses pembinaan moral Pancasila atau proses sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma Pancasila.

Data jenis kedua atau data kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan "hasil" pembinaan moral Pancasila. Data ini meliputi tiga aspek pokok: (1) pengetahuan tentang Pancasila (aspek kognisi), (2) sikap-mental yang Pancasila-lais (aspek afeksi), dan (3) tingkah laku yang Pancasila-lais (aspek psiko-motorik). Butir (1) dan (2) merupakan pengetahuan dan sikap mental *individual*, sedang butir (3) merupakan kelakuan individu dalam *kelompok sosialnya*. Selain itu data tersebut mengungkapkan pula soal pola penggunaan bahasa Indonesia dan pendapat tentang perlu tidaknya pengembangan dan pelestarian bahasa daerah.

Kedua jenis data ini dijamin dengan menggunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut: (1) *observasi* (mengenai teknik ini, lihat karangan H.W. Bachtar, 1983: 108-128), (2) *wawancara tidak berencana dengan menggunakan struktur*, dan (3) *wawancara berencana* (mengenai teknik ini, lihat karangan Koentjaraningrat, 1983: 129-157). Teknik pertama digunakan untuk mengecek, sedapat mungkin keabsahan data yang diperoleh dari teknik kedua dan ketiga. Teknik kedua khusus digunakan untuk menjarang data kualitatif. Sedangkan teknik ketiga untuk data kuantitatif.

Instrumen teknik kedua berupa pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan (jumlahnya berkisar antara 7 sampai dengan 13 buah, yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga yang menjadi sasaran penelitian) yang difokuskan pada aspek-aspek yang terkait dalam proses *pembinaan* atau sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma Pancasila (lihat uraian tentang data kualitatif di atas).

Kuesioner merupakan instrumen dari teknik penelitian ketiga. (Mengenai penggunaan dan penyusunan kuesioner, lihat karangan Selo Soemardjan & Koentjaraningrat, 1983: 173-219).

Kusioner ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian pendahuluan dan bagian pokok. Bagian pendahuluan berisi 10 pertanyaan tentang identitas responden. Sedangkan bagian pokok berisi 45 pertanyaan tentang "hasil" pembinaan moral Pancasila. Ke-45 pertanyaan ini terbagi ke dalam tiga jenis pertanyaan: (1) pertanyaan-pertanyaan tentang aspek kognisi para responden, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mereka tentang ide yang melekat dalam istilah "Pancasila" dan "P 4"; (2) pertanyaan-pertanyaan tentang aspek afeksi para responden, yang bertujuan untuk mengukur tingkat penghayatan mereka terhadap nilai-nilai moral Pancasila, dan (3) pertanyaan-pertanyaan tentang aspek psiko-motorik para responden, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengamalan mereka akan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sosialnya.

Pertanyaan-pertanyaan tentang aspek kognisi dan afeksi menyorot para responden dalam kualitas mereka sebagai individu-individu. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan tentang aspek psiko-motorik menyorot kualitas mereka sebagai individu-individu yang terjaring dalam kelompok-kelompok sosial mereka. Jawaban-jawaban atas jenis pertanyaan ketiga ini merupakan pembuktian dari jawaban-jawaban atas jenis pertanyaan pertama dan kedua. Dalam hal ini sekaligus merupakan pembuktian atas kegagalan atau keberhasilan upaya pembinaan moral Pancasila.

Di samping itu, terdapat 7 pertanyaan tentang pola penggunaan bahasa Indonesia yang secara tidak langsung merupakan pertanyaan tentang pola penggunaan bahasa daerah. Di samping itu juga 1 (satu) pertanyaan tentang pendapat responden mengenai perlu-tidaknya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Di satu pihak, ke-8 pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menggali data tentang unsur kedua dan ketiga dari kebudayaan nasional — yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sementara unsur pertama adalah Pancasila; di pihak lain, pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus dapat mengungkap data tentang kegagalan atau keberhasilan pembinaan moral Pancasila. Hal yang demikian disebabkan Pancasila merupakan etos kebudayaan nasional yang menjwai segenap unsur kebudayaan nasional, sehingga penerapan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada tempatnya masing-masing dapat dipandang sebagai tindakan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila.

Ke-45 pertanyaan tersebut merupakan kombinasi dari pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan-pertanyaan ini diramu dari butir-

butir P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa), yang merupakan Tap MPR No. II/MPR/1978, sebagaimana yang tercantum dalam buku: "Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila". Jakarta: BP-7 Pusat. 1990 hal. 28-29. Pertanyaan yang hanya mengandung satu butir P-4, ada pula yang mengandung dua sampai tiga butir P-4 dari dua sampai tiga sila. Butir-butir yang sudah muncul satu pertanyaan bisa muncul lagi dalam pertanyaan berikutnya dalam kombinasi dengan butir-butir lain dari sila-sila lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan jumlah pertanyaan, sekaligus memadatkan setiap isi pertanyaan.

Ada dua kriteria pokok dalam pemilihan butir-butir tersebut: (1) mudah dioperasionalkan ke dalam bentuk pertanyaan dan (2) butir-butir tersebut, untuk keperluan penelitian ini dianggap cukup mewakili Sila-sila dari Pancasila. Misalnya, butir (c) dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia — yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain — relatif lebih mudah dioperasionalkan ke dalam bentuk pertanyaan daripada butir (f) dari sila yang sama — yaitu menjauhi sikap pemeerasan terhadap orang lain. Jika butir (f) ini dipaksakan untuk dibuat pertanyaan, maka responden serta merta akan menjawabnya dengan kata: Ya, secara meyakinkan. Sebab logikanya, tidak ada orang yang ingin dicap sebagai pemeeras! Sebaliknya, jawaban atas pertanyaan yang bentuk dari butir (e) mungkin saja: Ya, tetapi dengan kualifikasi tertentu. Misalnya, Ya, terhadap kerabat sendiri, atau terhadap orang yang berasal dari suku bangsa sendiri, dan seterusnya. Dengan demikian pertanyaan yang lebih operasional, sebab jawaban yang diperoleh bukanlah jawaban yang otomatis, tetapi jawaban yang lebih bervariasi, lebih rinci, dan lebih sah.

Demikian pula butir (b) dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa — yaitu hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup — dapat dianggap lebih mewakili sila tersebut daripada butir-butir lainnya, terutama butir (a) — yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal yang demikian disebabkan: (1) percaya dan takwa kepada Tuhan adalah sikap yang kental dianut oleh bangsa-bangsa Timur pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, sehingga jawaban atas pertanyaan ini sudah dapat diduga sebelumnya dan relatif kurang "menarik". Dalam konteks hubungan antar umat beragama, bila dibandingkan dengan jawaban atas butir (b) tersebut; (2) jawaban atas pertanyaan yang dibentuk dari butir (b) menekankan nilai-nilai toleransi dan hormat-menghormati antar umat beragama, yakni nilai-nilai yang menjamin kerukunan hidup bangsa yang bhineka.

Berdasarkan pemikiran dan kriteria-kriteria di atas, maka butir-butir P-4 yang pilih untuk kemudian diramu menjadi 45 pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
 - b. Hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup;
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
 - b. Saling mencintai sesama manusia;
3. Sila persatuan Indonesia:
 - a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia;
 - e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika:
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan:
 - a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
 - a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
 - k. Menghargai hasil karya orang lain;
 - l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Data kuantitatif yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner, dan yang dianggap sebagai "hasil" pembinaan moral Pancasila yang diupayakan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal tersebut akan dianalisis dengan metode statistik (mengenai metode ini, lihat karangan Koentjaraningrat, 1983: 70-107; Mely G. Tan, 1983: 251-268; dan Soetandyo Wignyoebroto, 1983: 269-291). Data itu akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi dan tabulasi-tabulasi silang berdasarkan ketiga aspek pokoknya, yakni aspek kognitif, aspek efek-

tif dan aspek psiko-motorik. Semakin besar prosentase jawaban positif dalam aspek-aspek tersebut, terutama dalam aspek ketiga, semakin tinggi tingkat keberhasilan upaya-upaya pembinaan moral Pancasila, dan semakin besar peranan pendidikan formal dan nonformal dalam proses pembinaan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta. Sebagaimana telah dikemukakan, sasaran penelitian ini adalah lembaga-lembaga pendidikan formal dan lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Dalam hal ini yang termasuk kategori kedua adalah lembaga-lembaga pasar, koperasi, perusahaan swasta, kantor pemerintah, pesantren, dan gereja. Sebagaimana telah dikemukakan juga, pasar, koperasi, dan perusahaan swasta lebih menjalankan fungsi pranata ekonomi; kantor pemerintah lebih menjalankan fungsi pranata birokrasi; sementara pesantren dan gereja lebih menjalankan fungsi pranata keagamaan, daripada fungsi pranata pendidikan. Namun, dalam kenyataannya lembaga-lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pendidikan, khususnya pembinaan moral Pancasila. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga-lembaga pendidikan nonformal.

Untuk memperoleh data kualitatif tentang upaya-upaya pembinaan moral Pancasila, digunakan sebanyak 13 informan: camat (1 informan), guru PMP (2 informan), kepala sekolah (2 informan), dosen Pancasila (2 informan), kepala pasar (1 informan), pimpinan koperasi (1 informan), pimpinan perusahaan swasta (2 informan), pimpinan pesantren (1 informan), dan pimpinan gereja (1 informan). Sementara itu untuk memperoleh data kuantitatif mengenai "hasil" pembinaan moral Pancasila ditarik sebesar 115 responden: siswa SLTA (21 responden), mahasiswa (15 responden), pegawai negeri sipil (32 responden), karyawan swasta (22 responden), murid dan guru pesantren (10 responden), pengurus gereja (5 responden), dan pedagang pasar (10 responden).

1.6. Organisasi Tulisan

Penyusunan laporan hasil penelitian ini akan disajikan dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang dan Masalah Penelitian
- 1.2. Tujuan Penelitian
- 1.3. Batasan Konsep
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Metode dan Teknik Penelitian
- 1.6. Organisasi Tulisan.

Bab II. Gambaran Umum Daerah Penelitian

- 2.1. Lokasi Penelitian
- 2.2. Keadaan Alam
- 2.3. Kependudukan
- 2.4. Pendidikan
- 2.5. Ekonomi
- 2.6. Agama dan Kepercayaan
- 2.7. Kehidupan Politik.

Bab III. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan Nasional

- 3.1. Di lingkungan Pendidikan Formal
- 3.2. Di lingkungan Pendidikan Nonformal

Bab IV. Pembinaan Kebudayaan Nasional: Pembinaan Moral Pancasila.

- 4.1. Melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Formal
 - 4.1.1. Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
 - 4.1.2. Pada Perguruan Tinggi.
- 4.2. Melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Nonformal.
 - 4.2.1. Pada Lembaga Koperasi
 - 4.2.2. Pada Lembaga Pasar
 - 4.2.3. Pada Lembaga Perusahaan Swasta
 - 4.2.4. Pada Lembaga Pemerintah
 - 4.2.5. Pada Lembaga Keagamaan.

Bab V. Analisis, Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran:

1. Peta
2. Daftar Informan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Daerah Kotamadya Surakarta merupakan daerah lembah yaitu pertemuan antara daerah lereng gunung Merapi-Merbabu dan gunung Lawu, kota ini terletak pada 110^o-111^o Lintang Selatan. Sedang ketinggian terendah kota ini ialah 92 meter dan tertinggi 118 meter di atas permukaan laut.

Kemiringan daerah kota ini berat kearah Tenggara. Adapun penyebabnya adalah daerah Selatan merupakan daerah dataran rendah dan sebelah Timur merupakan lembah aliran Bengawan Solo. K arah Barat dan Barat Laut meninggi secara landai, dan kearah Utara bergelombang. Di dalam kota terdapat beberapa anak sungai, seperti sungai/Kali Pepe, Kali Anyar, dan Kali Jenes. Sedangkan di bagian pinggir kota sebelah Timur terdapat sungai/Bengawan Solo, yang merupakan sungai besar yang berhulu di daerah-daerah pegunungan di Wonogiri. Di daerah Wonogiri ini sungai Solo telah dibendung dengan bendungannya yang dinamakan Waduk Gajah Mungkur, merupakan pengendali banjir di sepanjang aliran Sungai Solo, termasuk kota Surakarta.

Daerah Kotamadia Surakarta berbatasan dengan:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali,
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Kotamadya Surakarta mempunyai luas wilayah: 4.404,0593 Ha, yang secara administratif meliputi 5 kecamatan dan 51 Kelurahan. Luas wilayah itu digunakan untuk lahan sawah 181,6420 Ha, Pengairan (irigasi 1/2 teknis) 142,5958 Ha, Tadah hujan 39,0470 ha, tegalan 192,7300 ha, pekarangan 3.369.4853 ha, kolam 1,0900 ha, dan lain-lain ada 659,112 ha. (statistik Kodia, Surakarta 1940).

Daerah administratif Kotamadia Surakarta yang terdiri 5 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Laweyan
2. Kecamatan Serengan
3. Kecamatan Pasar Kliwon
4. Kecamatan Jebres
5. Kecamatan Banjarsari.

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini sampel penelitian banyak berada di wilayah Kecamatan Jebres, di samping wilayah Kecamatan lainnya. Hal itu dikarenakan tempat dan jenis pendidikan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Jebres. Secara heterogenitas daerah ini terdapat berbagai faktor pendukung sebagai tempat penelitian yakni terdapat berbagai jenis dan jenjang pendidikan, perusahaan, pasar, kantor pemerintah, dan sebagainya.

2.2. Keadaan Alam

Daerah Kotamadia Surakarta yang mempunyai ketinggian 92 m diatas permukaan laut, ini berarti hampir sama tingginya dengan Sungai Bengawas Solo. Sebelum waduk Gajah Mungkur dibangun, di kota ini seringkali terjadi banjir, khususnya di daerah sebelah timur.

Sebagian besar kondisi tanah kota ini terdiri dari tanah liat dengan pasir (Regosol kelabu), di sana sini terdapat tanah padas. Di bagian tengah dan timur terdiri dari endapan lumpur, yakni daerah kraton dan daerah Kedunglumbu, karena dahulu daerah ini merupakan rawa-rawa.

Pada bagian utara, seperti kelurahan Mojosongo, kelurahan Kadipiro, Kelurahan Nusukan, umumnya keadaan tanahnya berupa tanah liat (lempung dalam bahasa Jawa) yang berwarna hitam dan merah (merupakan deposit gunung api lama). Di daerah ini kesuburannya kurang dan mempunyai daya retak yang kuat. Di bagian tengah, Selatan dan Barat pada umumnya tanahnya terdiri dari deposit gunung api muda yang subur di samping merupakan endapan lumpur yang subur dari sungai.

Daerah Surakarta ini beriklim panas dengan suhu udara maximum: 34,08°C, dan minimum 21,0°C. Kecepatan angin rata-rata di daerah ini yaitu 10,5 knot (Pusat meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan).

2.3. Kependudukan

Secara faktual tiap tahun perkembangan penduduk di satu kawasan tentu bertambah. Demikian pula Penduduk di Kotamadia Surakarta sampai sekarang tiap tahun tentu bertambah jumlahnya.

Pertambahan jumlah penduduk secara teori kependudukan dapat terjadi karena perkembangan dari dalam, yaitu adanya tingkat kelahiran (birth rate) yang ada pada penduduk tersebut. Meskipun demikian, ada kalanya pertambahan penduduk sebagai akibat adanya migrasi/urbanisasi penduduk suatu kawasan tertentu ke dalam kawasan tertentu. Daerah Surakarta sebagai sentral kehidupan budaya tentu tidak dengan sendirinya tumbuh karena kekuatan dari dalam saja. Faktor pertambahan penduduk di Surakarta juga ada karena akibat adanya urbanisasi dari kawasan sekitarnya. Alasan perpindahan

dahan mereka bermacam-macam. Misalnya, karena bencana alam, keadaan sosial, keadaan politik dan lain-lainnya yang dalam konteksnya akan berakibat bertambahnya penduduk di daerah Surakarta. Jadi pertambahan penduduk di kota ini bukan hanya akibat dari bertambahnya lapangan kerja saja, melainkan juga akibat terjadinya tekanan-tekanan sosial.

TABEL II. 1
PENDUDUK KOTAMADIA SURAKARTA TAHUN 1990

No.	Kelompok Umur	Banyaknya Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 — 4	41.165	42.397	83.562
2.	5 — 14	52.518	55.301	107.819
3.	15 — 24	56.009	59.738	115.747
4.	25 — 54	83.651	87.529	171.180
5.	55 keatas	18.616	20.043	38.659
	Jumlah	251.959	265.008	516.967

Sumber data, dari Kantor Statistik Kotamadia Surakarta tahun 1990.

Pola penyebaran penduduk di Kotamadia Surakarta terbagi pada 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Laweyan, meliputi Kelurahan Pajang, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Bumi, Kelurahan Penularan, Kelurahan Penumping, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sondahan, Kelurahan Kerten, Kelurahan Jajar, Kelurahan Karangasem (11 kelurahan).
2. Kecamatan Serengan, meliputi Kelurahan Jayatakan, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Tipes, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kemlayan (7 kelurahan).
3. Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi kelurahan Joyosuran, kelurahan Semanggi, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Kampungbaru, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sangkrah, kelurahan Kauman (9 Kelurahan).
4. Kecamatan Jebres, meliputi Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Sudioprajan, Kelurahan Gandekan, kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Tegalharjo, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo (11 kelurahan).
5. Kecamatan Banjarsari, meliputi Kelurahan Kadapiro, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Keprabon, Kelu-



rahan Timuran, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Punggawan, Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar (13 kelurahan).

Dengan demikian secara administratif Kotamadia Surakarta memiliki 51 kelurahan, penyebaran penduduk yang ada pada 5 Kecamatan yang terdiri dari 51 Kelurahan itu menyebar terserak secara tidak merata di dalam kawasan tersebut.

Dari catatan Kantor statistik, angka kepadatan penduduk di Kotamadia Surakarta adalah seperti tertuang pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 2

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Km ²)
1.	Laweyan	8,368	97.808	11.688
2.	Serengan	3,194	61.382	19.218
3.	Pasar Kliwon	4.815	81.114	16.846
4.	Jebres	12.582	120.306	9.562
5.	Banjarsari	14.811	156.357	10.557
	Jumlah	44.040	516.967	11.739

Sumber data, Kantor Statistik Kotamadia Surakarta, tahun 1990.

Berdasarkan observasi mengenai gejala-gejala penentu terhadap besarnya jumlah penduduk di Kodia Surakarta, maka Kecamatan Jebres memperlihatkan pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Hal itu sebenarnya bukan saja karena luasnya daerah pemukiman, melainkan adanya beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan itu adalah:

- (1). Terdapat suatu pusat pendidikan tinggi, seperti Universitas Sebelas Maret, yang pada tahun 1985 mempunyai jumlah mahasiswa sekitar 17.000 orang dan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) dengan jumlah mahasiswa 800 orang pada tahun 1985. Meskipun belum diadakan survei tentang asal daerah para mahasiswa tersebut, namun dapat diduga bahwa mereka sebagian besar berasal dari luar kota Surakarta. Mereka ini banyak menetap sementara di Kotamadia Surakarta, selama mereka mengikuti pendidikannya. Tumbuhnya usaha-usaha penduduk di Kecamatan Jebres membuka kegiatan pemondokan, juga mendorong pertumbuhan jumlah penduduk menjadi lebih besar dari kecamatan Laweyan. Pusat-pusat pemondokan mahasiswa di

Kecamatan Jebres ini, antara lain Kelurahan Kepatihan, Tegalharjo, Jebres.

- (2). Daerah atau wilayah Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jagalan yang termasuk daerah 'marginal kota' sangat strategis menjadi pemukiman bagi migran desa-kota. Dalam hal ini para migran tersebut bergerak pada bidang kegiatan sektor informal kota. Situasi daerah atau wilayah seperti di atas mempunyai kecenderungan sebagai penampung orang-orang desa (migran) tinggal di kota.

Pendatang baru ini meningkat pada tahun 1984, pada saat pemukiman Perumnas Mojosongo mulai dihuni oleh para pemiliknya.

Pendatang-pendatang yang merupakan salah satu unsur penambah pertumbuhan jumlah penduduk di daerah Jebres, dari segi status sosial dan ekonominya adalah:

- a. golongan pelajar/mahasiswa,
- b. golongan pencari kerja dari desa yang kemudian bergerak di sektor informal,
- c. golongan pegawai negeri yang menjadi penghuni baru di pemukiman Perumnas. Untuk golongan ketiga ini pertambahannya sangat tergantung dari perluasan wilayah pemukiman Perum Mojosongo. Oleh karena itu golongan ketiga bukan menjadi faktor dominan yang berlangsung terus dalam proses penambahan penduduk non-alami (bukan karena kelahiran) di Kecamatan Jebres.

Sedang golongan pertama dan golongan kedua akan menjadi faktor dominan pertumbuhan penduduk non alami di Kecamatan tersebut.

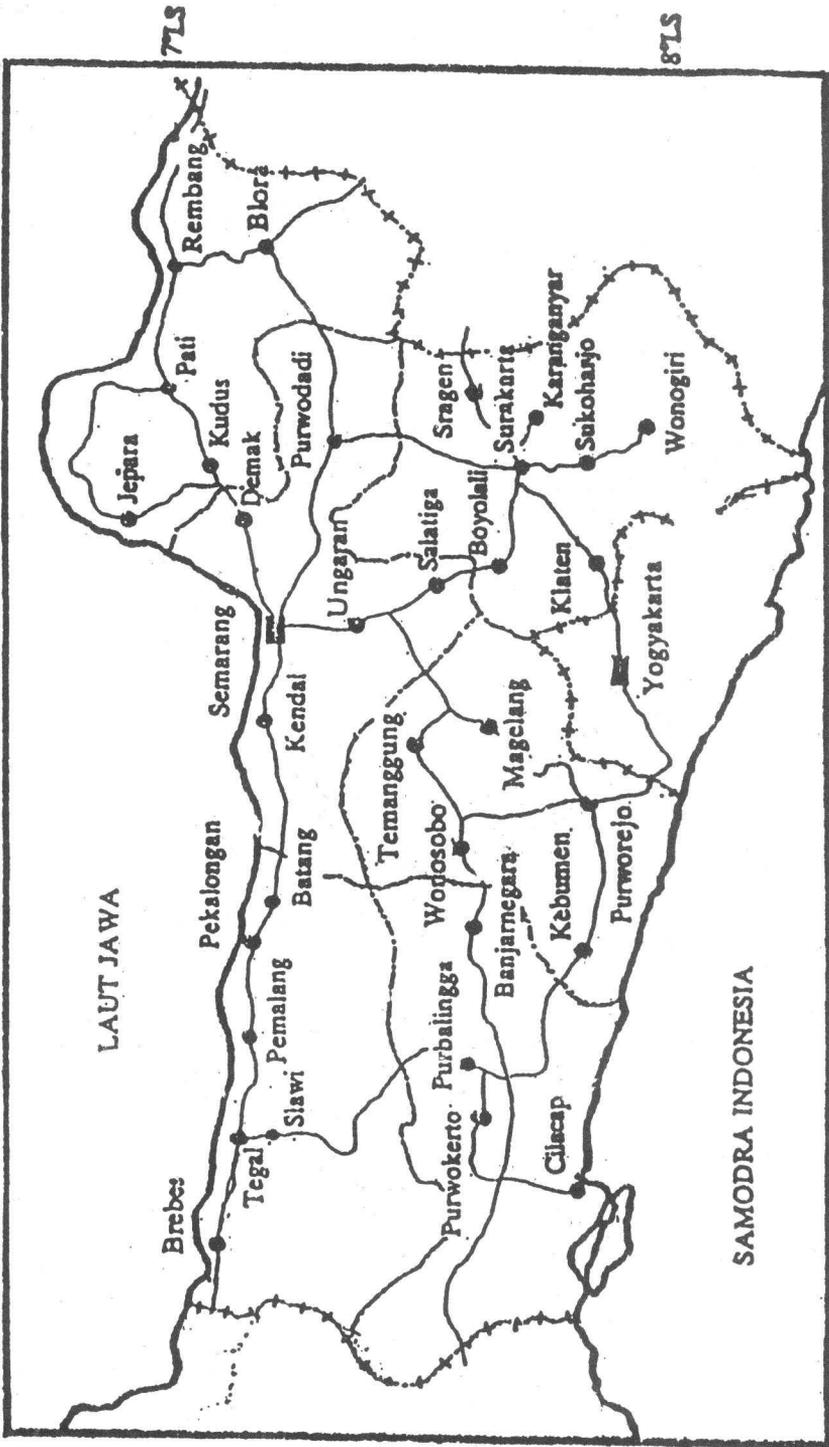
2.4. Pendidikan

Pendidikan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, karena pendidikan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bagi setiap penduduk.

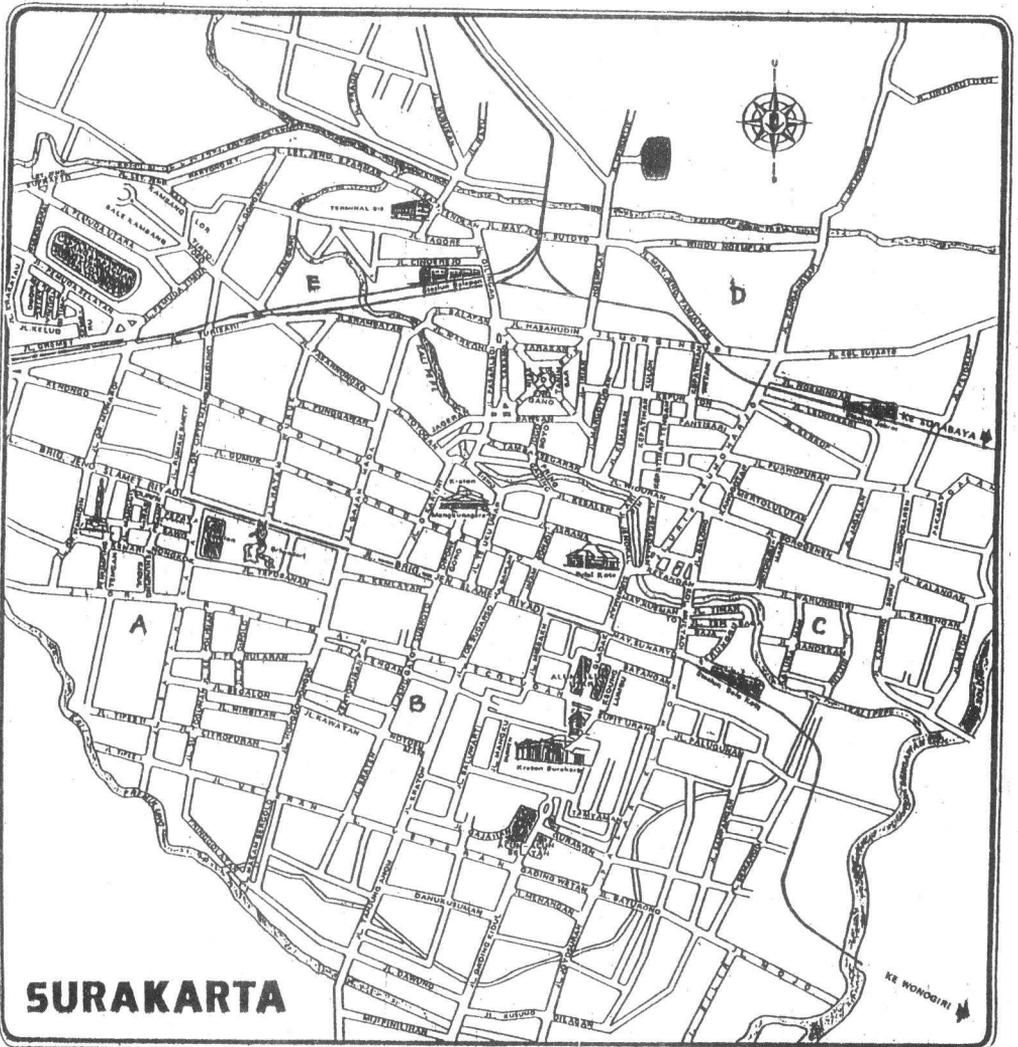
Dengan demikian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan merupakan suatu upaya yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fasilitas pendidikan di Kotamadia Surakarta termasuk daerah yang padat jumlah sekolahnya. Salah satu daerah yang paling lengkap yakni di Kecamatan Jebres. Potensi sekolah yang ada seperti pada tabel di bawah ini:

PETA PROPINSI JAWA TENGAH



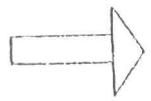
PETA KOTA MADYA SURAKARTA



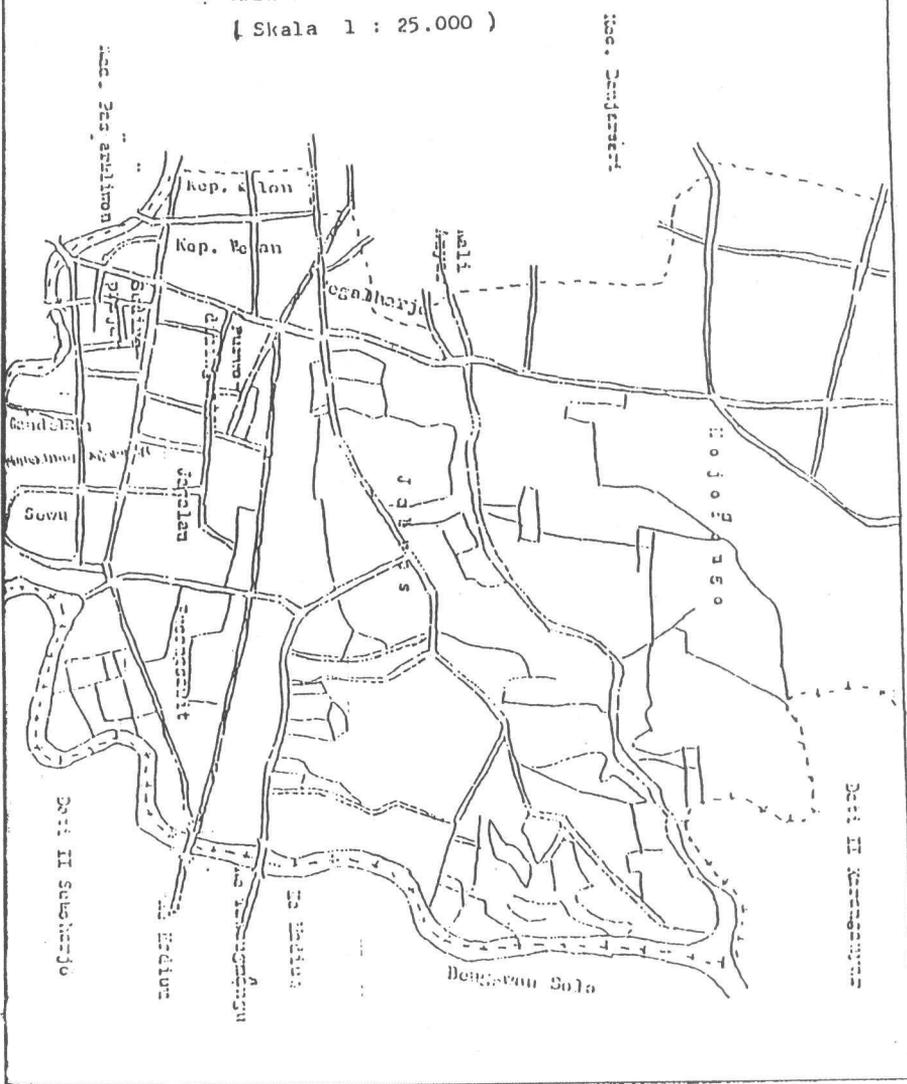
KETERANGAN :

- A. Kecamatan Laweyan
- B. Kecamatan Serengan
- C. Kecamatan Pasar Kliwon
- d. Kecamatan Jebres
- E. Kecamatan Banjarsari

U
P
A
V
E
A



P E T A
WILAYAH KECAMATAN JEBRES
KODIA DATI II SURAKARTA
(Skala 1 : 25.000)



TABEL II.3
DATA SEKOLAH, MURID DAN GURU

No.	Jenis Sekolah	S	G	M
1.	T.K. (Pendidikan Pra Sekolah)	69	156	2.744
2.	SD	78	662	15.759
3.	SLTP	21	474	6.472
4.	SLTA	22	669	6.211
5.	Akademi/Perguruan tinggi	6	1.429	19.683
6.	Kursus	7	11	123
7.	Madrasah Ibtidaiyah	1	7	161

Keterangan : S = Banyak sekolah
G = Banyak guru
M = Banyak murid

Sumber: Monografi Kecamatan Jebres Kodia. Surakarta tahun 1991.

Bila memperhatikan data fasilitas pendidikan di Kecamatan Jebres tersebut maka berbagai jenjang pendidikan (negeri/swasta) ada di daerah itu, baik dari TK (pendidikan pra sekolah) sampai dengan Perguruan Tinggi, bahkan sekolah kejuruan ada di daerah itu.

Dengan fasilitas pendidikan yang ada itu sangat memungkinkan bagi penduduk usia sekolah untuk memanfaatkan sekolah yang mereka inginkan tanpa harus keluar dari wilayahnya. Hal itu masih ditambah lagi adanya kemudahan di bidang transportasi, sehingga kelancaran akan lebih menjamin dalam rangka kegiatan bersekolah.

2.5. Ekonomi

Di Kecamatan Jebres terdapat 6 buah pasar umum. Diantaranya ada dua buah pasar yang telah memegang peranan ekonomi di kota Surakarta sejak puluhan tahun yang lalu. Pasar Gede telah mempunyai arti ekonomi penting bagi kota Surakarta sejak sebelum tahun 1939. Sedang Pasar Ledoksari, yang letaknya sebelah Selatan stasiun kereta api Jebres, pada tahun 1919 agaknya telah menjadi pusat kegiatan perdagangan antara pedagang di dalam kota dan para pedagang luar kota yang menggunakan transportasi kereta api dari stasiun Kereta Api Madiun. Pedagang-pedagang luar kota ini membawa dagangan hasil bumi/pertanian, kayu bakar dan sebagainya.

Pasar-pasar di pusat perbelanjaan kota, berlokasi pada suatu tempat

yang di sekelilingnya terdapat bangunan toko-toko yang secara fisik menjadi satu kompleks dengan bangunan pasar. Ada toko-toko yang secara fisik terpisah dari bangunan pasar, dan terletak beberapa puluh meter dari pusat bangunan pasar tersebut. Struktur fisik seperti ini jelas terlihat di lokasi-lokasi Pasar Gede. Toko-toko itu sebagian besar milik orang-orang Cina yang menjadi warganegara Republik Indonesia. Di Kompleks Pasar Gede, deretan toko-toko yang terletak di bagian Barat pasar adalah milik WNI keturunan Cina yang menjual aneka ragam roti dan kue-kue, bumbu masak serta berbagai jenis lauk pauk. Sedang pasar bagian Selatan juga milik WNI keturunan Cina yang menjual bahan pakaian. Beberapa puluh meter dari kompleks pasar Gede terdapat toko-toko besar milik WNI keturunan Cina, yang di antaranya merupakan "toko serba ada" dengan modal yang sangat besar. Misalnya: Toko Asia Baru yang terletak sekitar 500 meter di sebelah Utara pasar, merupakan "toko serba ada" dengan bangunannya bertingkat yang mempunyai puluhan toko.

Kegiatan lain yang menunjang aktivitas perekonomian adalah bursa tenaga kerja sektor informal. Tenaga kerja sektor informal ini terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan wanita. Mereka ini menyediakan tenaga kerjanya untuk membawa dagangan/barang-barang dagangan baik yang akan dijual di dalam pasar maupun yang telah dibeli oleh para tengkulak untuk dijual lagi di pasar-pasar kecil lainnya. Pengangkutan barang-barang ini hanya bersifat lokal, dari dalam pasar diangkut ke luar pasar dan sebaliknya, atau ke lokasi lain dengan becak, dan dengan colt atau jenis kendaraan motor roda empat lainnya. Proses dan mekanisme pengangkutan barang-barang semacam ini dapat dilihat jelas di lokasi Pasar Legi. Juga Pasar Gede yang merupakan pasar utama sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini para pedagang tengkulak dari dalam dan luar kota dapat membeli berbagai jenis barang dagangan. Para tengkulak yang bermodal kecil, biasanya membuka usahanya berupa toko-toko kecil, yang melayani pembeli perorangan untuk konsumsi rumah tangga, dan tengkulak kecil di kampung-kampung. Proses tersebut merupakan mata rantai kegiatan ekonomi kota yang melibatkan permodalan kecil dan permodalan besar. (Dr. Suyatno Kartodirjo, dkk. 1986/1987).

2.6 Agama dan Kepercayaan

Heterogenitas agama dan kepercayaan penduduk daerah Surakarta, khususnya di wilayah Kecamatan Jebres, terdapat 5 (lima) macam agama yang dipeluk oleh masyarakat dengan dilengkapi fasilitas ibadahnya. Menurut data tentang jumlah penduduk yang memeluk agama dan fasilitas tempat ibadahnya yang ada sebagai berikut:

TABEL II. 4
DATA PENGANUT AGAMA DAN TEMPAT FASILITAS IBADAH

No.	Agama	Pemeluk/Penganut	Fasilitas Ibadah
1.	Islam	82.418	Masjid = 48 Mushola = 35
2.	Kristen Protestan	17.991	Gereja = 38
3.	Khatolik	18.501	
4.	Budha	1.456	
5.	Hindu	1.175	Kuil = 3

Sumber: Mengenal Kecamatan Jebres Dalam Angka, tahun 1991.

Dari data seperti tersebut di atas, jelas bahwa mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan informasi, praktek kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Jebres cukup rukun walaupun agama yang dianut cukup beragam. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya gejala kerukunan antar umat beragama. Hal itu dapat diamati pada saat ada kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional Keagamaan, mereka saling berusaha ikut mensukseskan kegiatan tersebut. Masyarakat Jawa, lebih-lebih seperti di Surakarta yang konon sebagai Kota Budaya, secara umum masih percaya adanya kekuatan super natural yang ada di dunia ini. Dengan demikian masalah kepercayaan pun hidup dan berkembang di sini. Sementara itu, seorang antropolog kenamaan (Koentjaraningrat) dalam bukunya "Kebudayaan Jawa" (1984) menguraikan dengan jelas tentang kepercayaan/kebudayaan Jawa dari masa prehistori sampai dengan masa kini yang masih hidup dan berkembang. Orang Jawa kebanyakan mengenal dengan sebutan dhukun yaitu ahli spiritual Juga orang Jawa mengartikan ahli "pethung" (perhitungan). Ada beberapa dhukun, misalnya: dhukun paes (untuk manten), dhukun pijat (ahli urat-syaraf), dhukun bayi (ahli membantu proses kelahiran), sering pula mereka ini disebut ahli "kejawen".

Di samping ada yang mempunyai keahlian seperti tersebut di atas, juga ada yang ahli pengobatan tradisional, perhitungan hari baik dan buruk, menolak hujan. Menurut keyakinan orang Jawa, orang jadi dhukun diawali dengan tirakat (puasa, bertapa, tidak tidur, dll). Sampai saat ini orang yang berpredikat dhukun itu biasanya mempunyai status sosial yang lebih jika di banding dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat Jawa pada umumnya dengan tanpa memandang agama, status, pangkat dll, masih sering minta bantuan kepada seseorang dhukun/-ahli kejawen bilamana membutuhkan. Hal ini berkaitan erat dengan persepsi bahwa kesemuanya itu demi baiknya, keselamatan, ketenangan dan lain-lain.

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL

Istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata "buddhayah", yang merupakan bentuk jamak dari kata "budhi", yang berarti budi atau akal. Sedangkan istilah "culture" berasal dari bahasa latin, dari kata "colore" yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dari pengertian baku di atas oleh E.B. Tyler didefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang mengandung unsur-unsur ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan oleh R. Linton diartikan sebagai konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Dari definisi tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam macam dan bentuknya dilihat dari berbagai segi, dalam Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN juga telah digariskan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan asli dan lama terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Sedangkan kebudayaan nasional ialah kebudayaan yang didasarkan atas kebudayaan-kebudayaan daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang berkembang sepanjang sejarah, dan unsur kebudayaan dari luar yang memperkaya kebudayaan nasional tidak ditolak (Haryati Soebadio, 1991: 58). Dalam GBHN juga disebutkan bahwa kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa.

Dari pengertian-pengertian kebudayaan di atas, konsep yang dipakai disini adalah salah satu sumber utama sistem atau nilai-nilai suatu masyarakat. Sistem nilai yang dihayati seseorang atau yang berlaku dalam suatu bangsa tidak saja mencerminkan kebudayaan yang dianut, tetapi sekaligus membentuk sikap mental yang selanjutnya terpantul dalam pola tingkah laku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Sikap mental atau pola pikir yang langsung mempengaruhi pola tingkah laku seseorang atau masyarakat tampak menjadi kunci yang menentukan dinamika kemampuan dalam mengarungi berbagai

aspek kehidupan. Jadi jelas terlihat bahwa kebudayaan sebenarnya memasuki berbagai segi kehidupan manusia dan masyarakat. Logikanya, manusia dalam proses pembangunan diri dan masyarakat tidak mungkin dapat melepaskan diri dari unsur-unsur kebudayaannya. Lebih jauh, pendekatan kebudayaan dalam arti harus seperti di atas merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan suatu masyarakat terutama masyarakat yang sedang berkembang yang masih dalam proses pembentukan watak dan kepribadiannya.

Azas kehidupan negara dan masyarakat Indonesia yaitu Pancasila memiliki pola-pola prilaku dari kebudayaan yang turun-temurun (tradisional). Azas Pancasila sebagai azas kehidupan nasional bangsa Indonesia telah mendudukkan dalam dirinya rasionalitas kebudayaan nasional (modern), dengan aspek kemanusiaan yang universal. Pertumbuhan cara penghayatan dan pengamalan Pancasila yang diramu dari puncak-puncak kebudayaan daerah (tradisional) memastikan bahwa kepribadian kebudayaan nasional bangsa Indonesia dapat bertahan, karena berakar dalam hati sanubari setiap orang Indonesia. Pertumbuhannya akan menjadi lebih kuat, apabila diramu dengan rasionalitas kebudayaan modern dengan cita-cita masa depan yang berorientasi kepada pengetahuan dan teknologi.

Pola kehidupan kebudayaan nasional Indonesia terletak pada pembinaan individualitas manusia Indonesia yang kuat, sebagai ciri modernitas, dan warga masyarakat yang selalu setia dalam kebersamaan sebagai ciri tradisionalitas kebudayaan bangsa Indonesia. Modernitas dan tradisionalitas selalu ada dalam suatu kebudayaan yang mengalami perkembangan. Modernitas mendorong dinamika dan kreativitas dalam kehidupan. Adapun tradisionalitas memberikan kekokohan dan stabilitas kehidupan, untuk kemandirian pola-pola kebudayaan yang menjadi ciri kepribadian bangsa dan kebudayaannya.

Pada uraian lebih lanjut, akan disajikan berbagai pendapat mengenai persepsi masyarakat tentang arti pentingnya pembentukan kebudayaan Indonesia yang bersifat tradisional yang menuju pada kebudayaan nasional, yang lebih modern. Uraian tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam menjelaskan berbagai hal yang dapat mendorong atau menghambat perkembangan kebudayaan nasional yang sebenarnya telah menampakkan diri sebagai wujud dari buah budi atau cipta, rasa dan karsa rakyat Indonesia, yang perlu dibangun dan dikembangkan dengan cara menumbuhkan daya kreativitas kemampuan segenap rakyat Indonesia. Dalam hal ini antara lain melalui jalan pendidikan; baik pendidikan formal di sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan.

3.1. Persepsi masyarakat tentang Kebudayaan Nasional

Berdasar batasan kebudayaan seperti telah dirumuskan di atas, maka kebudayaan mempunyai macam dan corak yang beraneka ragam bentuknya, akan tetapi pada dasarnya kebudayaan yang bagaimanapun tidak akan lepas dari unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. alat perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, senjata-senjata, alat-alat pengangkutan dan lain sebagainya,
- b. mata pencaharian hidup, seperti bercocok tanam, beternak, berburu, berdagang dan lain sebagainya,
- c. pranata masyarakat, seperti hukum, aturan perkawinan, peraturan keanggotaan kemasyarakatan dan lain sebagainya,
- d. kesenian, baik seni rupa, seni suara, seni drama, seni gerak dan lain sebagainya,
- e. bahasa, baik lisan maupun tertulis,
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- g. religi atau keagamaan.

Ketujuh unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, artinya ketujuh unsur kebudayaan itu terdapat pada kebudayaan di mana saja, dan milik bangsa apa saja. Ketujuh unsur tersebut disebut "Cultur Universal".

Integrasi (keutuhan) kebudayaan terjadi karena isi kebudayaan itu telah tersusun menurut corak-corak yang permanen dan semi permanen. Dalam setiap kebudayaan selalu dijumpai adanya pola, adanya corak dari tiap segmen yang besar. Adanya corak dan segmen-segmen tersebut akan bersatu membentuk corak yang lebih besar yang akhirnya akan menjadi desain dari kebudayaan secara keseluruhan, inilah yang disebut konfigurasi oleh R. Linton pada definisi kebudayaan di atas. Corak yang satu dengan yang lain terdapat dalam keserasian dan bercampur menjadi konfigurasi yang harmonis. Keharmonisan tersebut muncul karena adanya suatu kecenderungan tertentu atau tendensi tertentu oleh setiap kebudayaan. Kecenderungan utama dengan arah inilah yang mengakibatkan integrasi dari kebudayaan sehingga dapat dikatakan bahwa unsur-unsur universal tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh (terintegrasi) sehingga dalam melihat suatu kebudayaan maka harus dilihat pula sebagai satu kesatuan yang utuh.

3.1.1. Dilingkungan pendidikan formal

Dalam GBHN disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Di dalam pengertian ini, pendidikan yang dituju menanamkan juga unsur-unsur kebudayaan yang harus diterapkan guna menunjang kebudayaan nasional. Butir Kebudayaan dipertegas lagi, bahwa nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh rasa persatuan. Dari uraian tersebut jelas terdapat hubungan yang erat antara kebudayaan Indonesia yang dikembangkan dengan sistem pendidikan dan yang dikembangkan dengan sistem pendidikan dan yang dikembangkan melalui P-4. Hubungan ini dipertegas dengan diselenggarakannya penataran-penataran bagi siswa, mahasiswa, bahkan pegawai-pegawai pemerintah. Dari pengumpulan pendapat para responden di lingkup pendidikan formal, didapatkan beberapa pendapat serta konsep-konsep kebudayaan nasional.

Dari penelitian yang dilakukan di Dati II Jateng, tepatnya di wilayah Dati II Surakarta, umumnya istilah Pancasila dan P-4 sudah begitu sering didengar oleh masyarakat lingkup pendidikan formal ini. Pengenalan/pengertian masyarakat tentang P4 tersebut didapat melalui materi-materi pelajaran mata kuliah, diskusi-diskusi, bahkan dalam lomba P-4 yang sering diadakan. Istilah Pancasila dan P-4 dapat dikatakan sudah umum, hal itu dibuktikan dari 94 responden, lebih dari 80% menjawab pernah mendengar tentang Pancasila dan P-4. Lain halnya responden perihal seputar Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, jiwa dan kepribadian serta diterapkan sehari-hari lebih kecil persentasenya dibandingkan dengan prosentase dari berbagai jawaban yang relevan tetapi tidak mencantumkan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan pelajar, mahasiswa rata-rata 75% dari jumlah responden yang ada, jawabannya berupa konsep-konsep yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan pemahaman tentang P-4. Hal itu memberikan indikasi bahwa pada lingkungan pendidikan formal konsep-konsep Pancasila, P-4 termasuk di dalamnya tentang kebudayaan Nasional, telah banyak ditelaah, dipelajari, tetapi tidak menjamin bahwa pengamalannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti disinggung di atas bahwa unsur kebudayaan Nasional telah termasuk dalam butir-butir Pancasila melalui P-4 akan tetapi salah satu

indikator yang menarik untuk diteliti lagi adalah pemakaian bahasa sebagai salah satu unsur penting dalam kebudayaan Nasional. bahasa baik lisan maupun tertulis adalah unsur paling penting atau paling mendasar dalam rangka pembentukan kebudayaan Nasional. Di lingkungan formal semacam ini pemakaian bahasa Indonesia telah menempati urutan utama. Dari hasil pool pendapat, lebih dari 50% bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi dan alat pemersatu baik di lingkungan sekolah, maupun pekerjaan.

Dari hasil pengumpulan pendapat dikatakan bahwa peranan bahasa sangat penting dalam rangka pembentukan Kebudayaan Nasional. Dengan bahasa manusia dapat meneruskan, mendukung, memperkuat dan menyempurnakan kebudayaan. Bahasa mempunyai fungsi sosial yang digunakan sebagai alat penghubung antara kebudayaan satu suku daerah dengan yang lainnya.

Menempati urutan kedua sebagai unsur kebudayaan Nasional yang penting menurut lingkungan pendidikan formal adalah ilmu dan teknologi. Tiap-tiap kebudayaan mempunyai pengetahuan tentang alam sekelilingnya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain. Hal itu terjadi karena manusia terdorong oleh kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidup. Teknologi secara kultural dapat diartikan sebagai segala adat istiadat sosial yang memungkinkan manusia mengolah berbagai jenis kebutuhan material. Sistem pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan yang dirasa mendesak karena keterbelakangan bangsa yang sedang berkembang disebabkan miskinnya arus teknologi dan ilmu pengetahuan. Budaya nasional harus ditumbuhkan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan rasa kebanggaan nasional akan budaya nasionalnya. Di sini keterkaitan unsur Bahasa dan Ilmu pengetahuan sangat penting, dalam penguasaan ilmu dan teknologi harus mampu diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.

Unsur selanjutnya yang penting dalam proses pembentukan kebudayaan nasional adalah kesenian. Di dalam kesenian unsur yang sangat penting adalah unsur estetika, yang terintegrasi dalam unsur-unsur kebudayaan yang lain. Pada konsep-konsep tradisional, kesenian pada mulanya adalah tingkah laku, cara berbuat dan berpikir dari individu untuk menyalurkan hasrat guna memperbaiki, memperhalus cara mengatur tata warna, maupun suara, yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat dan diturunkan pada generasi berikutnya. Dalam masyarakat yang lebih modern, kesenian tidak lagi ditangani oleh segolongan/kelompok individu, akan tetapi telah dikembangkan sebagai ciri-ciri dari kebudayaan nasional yang mempunyai ciri dan warna yang tidak banyak berbeda.

Dari beberapa responden, unsur-unsur lain dalam pembentukan kebudayaan nasional yang tak kalah penting setelah kesenian adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini tiap daerah mempunyai perbedaan baik bentuk maupun caranya, akan tetapi dalam lingkup sosial yang lebih luas organisasi sosial kemasyarakatan lama-lama akan membentuk suatu wujud baru tanpa meninggalkan ciri-ciri khususnya, dikarenakan telah mengalami penyesuaian-penyesuaian yang dikondisikan terhadap lingkungan sosial yang kian beragam. Erat kaitannya dengan lingkup sosial, keanekaragaman/kepercayaan telah dilindungi oleh undang-undang kebebasan individu untuk memeluknya, diimbangi oleh rasa toleransi antar pemeluk yang satu dengan yang lain. Preferensi memilih lingkungan sosial yang berbeda agama di lingkungan pendidikan formal, adalah hampir 75% ke atas menyatakan terbuka bagi golongan agama lain untuk menjadikan sebagai teman atau lingkungan sosial. Begitu juga halnya dalam memilih lingkungan sosial dari beberapa golongan suku bangsa. Umumnya hampir 90% preferensi memilih golongan suku-bangsa lain sebagai lingkungan sosialnya tanpa membedakan status sosialnya.

Pendapat tentang pelestarian dan pengembangan budaya tradisional ke arah kebudayaan nasional mendapatkan 98,9% dari 94 responden, dalam arti pelestarian dan pengembangan budaya memperoleh dukungan kuat bagi terwujudnya kebudayaan nasional Indonesia. Dalam hal ini dengan catatan, bahwa ujud pelestarian/pengembangan budaya sebagaimana tersebut diatas didasari sikap kebanggaan nasional yang berlandaskan sikap kreatif, kognitif dan dedikatif sebagai modal dasar untuk melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan kebudayaan nasional. Hal itu sesuai dengan yang diharapkan dan diupayakan secara objektif terbuka dan kritis terhadap pengaruh budaya lain yang cenderung menambah atau mengurangi sistem nilai dan moralitas yang telah ada, tanpa bersikap apriori terhadap budaya daerah yang kurang dikenal secara nasional.

3.1.2. Di Lingkungan Pendidikan nonformal

Persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional di lingkungan pendidikan nonformal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lingkungan pendidikan formal. Perbedaannya hanya terbatas pada penempatan prioritas atau penekanan-penekanan yang relevan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap pembentukan kebudayaan nasional. Seperti diketahui pada lingkungan inilah yang kuat atau cenderung lebih kuat memegang nilai-nilai tradisional dengan lebih mendalam dan menganutnya secara turun-temurun. Lingkungan nonformal yang dimaksud adalah pendidikan pada keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lingkung-

an pedagang dan pekerja-pekerja swasta, yang secara eksplisit berada di luar jalur pemerintah.

Lingkungan keluarga dan lingkungan organisasi keagamaan mendapatkan porsi lebih banyak dalam prosentase pengenalan masyarakat terhadap kebudayaan Nasional. Hal itu dapat terwujud melalui media-media yang ada, seperti radio, televisi, penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya. Di samping itu sebagian pegawai-pegawai swasta ada yang juga mendapatkan penataran P-4 di tempat bekerja. Kebudayaan Nasional yang terkandung dalam Pancasila dan P-4, dipahami dan diamalkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya konsep-konsep tertulis. Hal itu disebabkan kaum pedagang dan pegawai swasta banyak disibukkan oleh pekerjaan mereka, sehingga banyak yang memberikan jawaban tentang dasar negara sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup bangsa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari relatif lebih banyak daripada lingkungan formal. Nilai-nilai yang terkandung dalam P-4 dan Pancasila telah tertanam pada kebiasaan sehari-hari yang dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, lingkungan bekerja serta lingkungan sosialnya.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur kebudayaan Nasional juga menempati prioritas utama. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi antar golongan ternyata mendukung terjadinya pembauran yang relatif lebih nyata. Seperti diketahui di berbagai kalangan swasta banyak berbaur masyarakat antar etnis yang beragam dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Preferensi dalam memilih lingkungan sosialnya lebih beragam lagi yaitu adanya toleransi yang lebih besar terhadap golongan agama lain. Antara golongan Islam, Kristen, Katolik dalam pemahaman tentang P-4 mempunyai presentasi yang agak berimbang dalam penerapan Pancasila sebagai dasar dan jiwa serta pandangan hidup. Akan tetapi prosentase jawaban yang relevan yang tidak mencantumkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ternyata lebih besar prosentasenya. Hal ini merupakan indikasi bahwa kepentingan golongan agama, suku, dan daerah asal di lingkungan nonformal masih kuat. Hal itu senada pula dengan penerapan adat istiadat yang turun-temurun dianut oleh segolongan masyarakat yang masih sulit ditembus oleh kebudayaan-kebudayaan lain, oleh karena adanya pantangan ataupun keengganan merubah tatanan yang sudah ada. Akan tetapi dalam gagasan/pendapat tentang konsep kebudayaan nasional juga ditanggapi secara positif, hanya porsi prioritas utama agak berlainan dari konsep masyarakat dari lingkungan pendidikan formal.

Pada lingkungan nonformal ini, fungsi religius seperti kepercayaan atau agama menempati porsi yang besar sebagai salah satu unsur kebudayaan Nasional yang akan dicapai. Butir-butir kebudayaan Nasional

adalah suatu budaya yang diinternalisasi oleh Pancasila dan kesepakatan/konsensus yang diambil dan selalu memancarkan nilai-nilai religius, taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur bahasa sebagai alat pemersatu juga mendukung berkembangnya kebudayaan Nasional yang diinginkan. Dengan mengekspresikan rasa keindahan seni budaya daerah yang ditranslasikan ke dalam bahasa nasional, nilai-nilai kebanggaan daerah dapat dinikmati oleh daerah lain, sehingga rasa ikut mempunyai dapat dipupuk sebagai modal dasar terciptanya kebudayaan nasional.

Unsur-unsur yang relevan terhadap sikap selanjutnya terhadap kebudayaan Nasional yang dipersepsikan terwujud, adalah sikap yang tidak meninggalkan tradisi yang telah ada, tetapi justru lebih ditingkatkan lagi sehingga sampai pada puncaknya. Dalam hal ini menurut GBHN puncak-puncak budaya daerah di seluruh Indonesia merupakan kebudayaan Nasional. Lingkungan nonformal cenderung mempertahankan dan menyesuaikan tradisi yang dipunyai sejak nenek moyang dengan keadaan sekarang, daripada menerima kebudayaan lain yang sama sekali baru.

Dari konsep-konsep di atas tentang persepsi masyarakat terhadap kebudayaan nasional, jelas menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kebudayaan nasional Indonesia itu telah menampakkan diri sebagai wujud dari buah budi atas cipta, rasa dan karsa rakyat Indonesia, yang perlu dibangun dan dikembangkan dengan cara menumbuhkan daya kreativitas segenap rakyat Indonesia, antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan. Perlunya upaya mengembangkan kebudayaan nasional Koentjaraningrat menyarankan harus dilakukan usaha-usaha yang serius untuk meninggikan kapasitas intelektual dengan menumbuhkan kebiasaan membaca dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan akan wawasan serta kebudayaan-kebudayaan yang berada di sekelilingnya (Koentjaraningrat, 1990: 108).

BAB IV

PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembinaan Kebudayaan Nasional. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tidak hanya berupa pendidikan formal atau pendidikan di sekolah saja, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah. Pendidikan formal sebagaimana diketahui merupakan pendidikan yang diberikan oleh para pengajar kepada anak didik mereka di sekolah. Sementara itu pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diterima oleh anggota masyarakat di luar sekolah, baik itu dikantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, di lembaga-lembaga keagamaan, serta lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi, pasar dan lain-lain.

4.1. Melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Formal

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang banyak berperan dalam membina kebudayaan nasional. Sekolah yang dimaksudkan di sini meliputi sekolah menengah dan perguruan tinggi. Melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu para siswa dan mahasiswa diajak untuk mengenal dan memahami kebudayaan nasional kita. Pada sekolah lanjutan tingkat atas, mata pelajaran PMP merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan itu; Sedangkan pada Perguruan Tinggi tampaknya mata kuliah Pancasila yang dimaksudkan untuk hal itu.

4.1.1. Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Untuk sekolah lanjutan Tingkat Atas penelitian dilakukan di sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri dan Swasta, serta sekolah Islam dan Kristen. Hal itu dimaksudkan agar berbagai jenis SLTA terwakili. Pendidikan Moral Pancasila sebagaimana telah disebut di depan merupakan salah satu mata pelajaran yang mengandung langkah-langkah pembinaan kebudayaan nasional; selain pelajaran Bahasa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan salah satu unsur pokok dan etos dari kebudayaan nasional (Alfian, Editor 1985: 20). Dengan demikian maka sangat relevan apabila mata pelajaran PMP merupakan salah satu pelajaran yang diujikan dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). dari hasil EBTANAS setidaknya akan dapat dievaluasi keberhasilan pemberian pelajaran PMP kepada para siswa. Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap perilaku para siswa, apakah perilaku mereka telah mencerminkan perilaku yang bermoral Pancasila atau belum. Dengan demikian keberhasilan dari pengajaran

Pendidikan Moral Pancasila, yang secara langsung atau tidak akan terlihat dari perilaku para siswa. Dengan demikian perilaku siswa juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari usaha pembinaan kebudayaan nasional.

Dari beberapa sekolah yang diteliti diketahui bahwa mata pelajaran PMP diberikan sejak kelas I sampai dengan kelas III dengan materi yang berbeda-beda. Untuk kelas I materinya adalah: pengamatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membina persahabatan antar bangsa. Pada kelas II diberikan materi yang lebih lengkap yaitu:

- pengamalan derajat, harkat dan martabat manusia
- keadilan dan kebijaksanaan
- pengamalan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- pengamalan semangat kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat.
- pengamalan rasa persatuan dan kesatuan, wawasan nusantara sebagai ketahanan nasional.
- pengamalan demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat
- pengamalan pola hidup sederhana dalam sikap dan perbuatan
- menghargai hasil karya orang lain
- pengamalan azas kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan sosial
- pengamalan tolong menolong antar sesama warga
- pemahaman lembaga perwakilan rakyat sebagai pencerminan musyawarah untuk mufakat.

Sementara itu pada kelas III materi yang diberikan pada prinsipnya berupa pendalaman materi, sebagai berikut:

- kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- hak hidup dan berkembang setiap agama yang diakui negara.
- keluhuran nilai kemanusiaan, sayang kepada orang lain seperti menyayangi diri sendiri.
- saling menghormati dengan bekerjasama dengan orang lain
- musyawarah dengan kebenaran dan keadilan
- hak dan kewajiban warga negara
- menggalakkan usaha mandiri
- koperasi sebagai saka guru perekonomian Indonesia
- perkembangan teknologi dan pembangunan.

Mata pelajaran PMP ini diberikan seminggu sekali selama dua jam pelajaran. Waktu yang sedikit tersebut dirasa oleh para guru dan siswa kurang memadai sehingga mereka merasa perlu menambah waktu

belajar PMP di luar jam sekolah (wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Kesenian Indonesia Surakarta). Adapun metode pengajaran PMP pada umumnya berupa metode bervariasi, yaitu ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi, pembuatan klipring dan makalah yang harus dilakukan oleh para siswa. Hal yang demikian ditempuh karena tujuan pengajaran PMP terutama bersifat efektif, walaupun terkandung pula tujuan kognitif (wawancara dengan guru PMP di SMKI Surakarta).

Pembinaan moral para siswa tidak hanya dilakukan lewat pelajaran PMP dan Penataran P-4 tetapi juga melalui tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Dari beberapa sekolah yang diteliti, rata-rata memiliki tata tertib dan peraturan yang sangat positif. Tata tertib tersebut dan peraturan yang harus ditaati oleh para siswa. Pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah akan dikenakan sanksi yang bersifat mendidik. Semua itu dimaksudkan sebagai kontrol sosial dari pihak pengelola sekolah dengan tujuan agar tercapai kondisi yang diharapkan. Kecuali sanksi yang diberikan terhadap pelanggar tata tertib, juga diberikan ganjaran atau hadiah bagi siswa yang berprestasi. Hadiah itu biasanya berupa pembebasan SPP selama satu semester (wawancara dengan Kepala SMA Negeri III Surakarta).

Kecuali pembinaan moral terhadap para siswa, kepada para guru pun juga diberi pengarahan dan pembinaan. Setiap pertemuan awal tahun para guru diberi pengarahan mengenai cara menyajikan berbagai mata pelajaran dengan menarik. Hal itu akan berdampak pada meningkatnya minat siswa terhadap mata pelajaran yang diberikan.

Selain pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, pelajaran Bahasa Indonesia juga merupakan langkah-langkah pembinaan kebudayaan nasional. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Oleh karena itu pengajaran bahasa merupakan hal yang sangat penting bagi usaha pembinaan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara resmi dipakai sebagai pengantar dalam proses belajar-mengajar. Kecuali itu bahasa Indonesia kadang-kadang juga dipakai dalam pergaulan sehari-hari antar sesama murid, antar murid dan guru/pimpinan sekolah, antar murid dan karyawan, serta antar guru/pimpinan sekolah dan karyawan (wawancara dengan Kepala SMKI Surakarta dan Kepala SMA Negeri III Surakarta). Menurut para responden yang berasal dari lingkungan sekolah ini bahasa Indonesia dirasa sebagai bahasa yang komunikatif, karena tidak mengenal tingkatan-tingkatan yang rumit seperti bahasa Jawa. Oleh karena itu

mereka merasa lebih mudah menyampaikan suatu maksud atau menjelaskan segala sesuatu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, bahasa daerah (dalam hal ini bahasa Jawa) bukan lantas tidak dipakai, tetapi tetap dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, bersamaan dengan pemakaian bahasa Indonesia sehingga kita sering mendengar bahasa campuran yang khas anak muda.

Di kalangan para guru pun tampaknya ada usaha untuk mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal (di kantor/sekolah). Tidak hanya dalam kesempatan dinas/resmi saja mereka menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga pada kesempatan-kesempatan lain yang memungkinkan.

4.1.2. Pada Perguruan Tinggi

Untuk lembaga pendidikan formal di atas SLTA, penelitian dilakukan di Peruruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Tidak seperti pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pada Perguruan Tinggi tidak terdapat mata kuliah Pendidikan Moral Pancasila. Ada pun yang diberikan di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah Pancasila yang merupakan mata kuliah wajib univertitas. Hal itu berarti setiap mahasiswa dari fakultas apapun wajib mengambil mata kuliah Pancasila. Mata kuliah tersebut diberikan pada mahasiswa tingkat pertama selama satu semester, disajikan dalam 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan atau tatap muka berlangsung selama 2 jam kuliah atau 100 menit (wawancara dengan dosen Pancasila Pada STSI Surakarta).

Kecuali Pancasila, mata kuliah Bahasa Indonesia juga merupakan mata kuliah wajib universitas. Seperti Pancasila, bahasa Indonesia juga diberikan pada mahasiswa tingkat pertama tetapi selama dua semester. Kedua mata kuliah tersebut dinilai sangat penting dalam usaha pembinaan kebudayaan nasional.

Mata kuliah Pancasila mencakup materi seperti Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pengajaran Pancasila, terutama yang berkaitan dengan P-4 sebagaimana diketahui mempunyai tujuan yang bersifat kognitif, effectif dan psikomotorik. Tujuan kognitif lebih menekankan pemahaman akan Pancasila itu sendiri, yang kemudian berlanjut dengan penjiwaan terhadap Pancasila. Apabila langkah ini telah tercapai maka diteruskan pada usaha untuk meyakini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Jika seseorang telah sampai pada taraf ini maka diharapkan akan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut. Memang tidak

mudah untuk mewujudkan hal itu, karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami, menjiwai dan meyakini Pancasila, apalagi dalam mengamalkannya.

Dalam usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut digunakan beberapa pengajaran Pancasila. Misalnya metode ceramah dan diskusi merupakan metode utama di samping metode simulasi (wawancara dengan Dosen Pancasila pada UNS Surakarta). Kecuali itu pada dasarnya Pengajaran Pancasila tidak hanya dilakukan di ruang kuliah saja, tetapi juga di lingkungan kampus lainnya. Hal itu berarti bahwa pendidikan moral dan penanaman sikap yang sesuai dengan jiwa Pancasila dilakukan setiap saat, tidak terbatas pada jam-jam kuliah saja.

Selain kuliah Pancasila yang di dapat di kelas, para mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti penataran P-4 (pola 100 jam) yang biasanya dilaksanakan secara terpadu dengan pengenalan lembaga universitas/fakultas secara lebih mendalam. Untuk mengevaluasi hasil pengajaran Pancasila bagi mahasiswa dilakukan dengan mengadakan ujian semester dan tentu saja yang lebih penting adalah dengan mengamati sikap, apakah ada perubahan sikap seperti yang diharapkan atau tidak. Walaupun tidak mudah merubah sikap seseorang menjadi lebih baik (sesuai dengan moral Pancasila) tetapi hal itu harus selalu dilakukan. Untuk Penataran P-4 evaluasi dilakukan melalui Pre-test dan post-test. Pre-test dilaksanakan sebelum para petatar ditatar sedangkan post-test diadakan setelah para petatar ditatar. Dengan membandingkan hasil dari kedua test itu maka akan diketahui bagaimana hasil dari penataran P-4 bagi para mahasiswa tersebut.

Berkaitan dengan usaha pembinaan kebudayaan nasional maka penanaman nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila kepada generasi muda adalah merupakan hal yang sangat tepat. Oleh karena itu proses internalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila berarti juga merupakan salah satu usaha untuk membina kebudayaan nasional.

Di samping pengajaran Pancasila, pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan kampus secara efektif juga sangat menunjang pembinaan-kebudayaan nasional. Lingkungan Perguruan Tinggi yang memungkinkan bertemunya para mahasiswa dari berbagai suku memerlukan sarana komunikasi (dalam hal ini bahasa) yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Sehubungan dengan hal itu maka penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus menjadi lebih intersif.

4.2. Melalui lembaga-lembaga Pendidikan Nonformal.

Lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi lembaga koperasi, lembaga pasar dan lembaga perusahaan swasta yang ketiganya mewakili pranata ekonomi. Di samping itu juga lembaga pemerintah: kantor kecamatan dan kantor Depdikbudcam serta lembaga keagamaan yang meliputi pesantren dan gereja.

4.2.1. Pada Lembaga Koperasi

Lembaga koperasi merupakan salah satu bagian dari pranata ekonomi yang paling banyak menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Para pengurus koperasi yang menjadi lokasi penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil (koperasi karyawan dari sebuah kantor pemerintah), sehingga pada umumnya mereka telah ditatar P-4. Hal itu dapat dilihat dari cara mereka menangani dan mengembangkan Koperasi karyawan tersebut. Prinsip gotong royong dan menciptakan suasana kekeluargaan dipegang teguh serta dilaksanakan dengan maksimal. Kecuali itu mereka juga berusaha untuk bersama-sama dengan seluruh anggota koperasi mewujudkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang merata.

Sementara itu kontrol sosial yang dilakukan terhadap lembaga koperasi juga cukup mendukung terwujudnya kondisi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap jujur dan bersih dalam mengelola koperasi selalu ditanamkan kepada para pengurusnya. Dengan diterapkannya sanksi-sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi menyebabkan orang harus berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian nilai-nilai moral yang sesuai dengan budaya bangsa tetap terjaga dan terpelihara dengan semestinya.

4.2.2. Pada Lembaga Pasar.

Lembaga Pasar diwakili oleh Pasar Gede yang terletak di Kecamatan Jebres. Responden yang diambil terdiri dari para pedagang dengan berbagai jenis barang dagangan yang dijual, dari pedagang dengan modal kecil sampai pedagang yang bermodal agak besar.

Unsur pendidikan yang dinilai berkaitan dengan pembinaan kebudayaan nasional, yang terdapat dalam kehidupan pasar itu terutama adalah dalam sikap tenggang rasa dan toleransi antar sesama pedagang. Para pedagang yang menjadi responden rata-rata adalah pedagang yang tidak mempunyai tempat-tempat permanen. Mereka menggelar dagangannya di lantai, saling bersebelahan tanpa memakai

pembatas yang pasti. Artinya tidak ditentukan secara pasti berapa lebar tempat berjualan si A, B dll. Dalam kondisi seperti ini justru diperlukan sikap saling menjaga. Tenggang rasa dan toleransi sangat dituntut dari mereka sehari-hari. Mereka pada umumnya merasa senasib, sama-sama menjadi orang boro (bagi mereka yang berasal dari desa atau daerah lain), yang mencari nafkah sebagai pedagang. Meskipun demikian bukan berarti sama sekali tidak pernah ada perselisihan di antara para pedagang tersebut. Sesekali terjadi juga percekocokan yang memperlmasalahkan tempat berjualan yang terdesak oleh pedagang lain. Permasalahan seperti itu selalu bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pedagang itu sendiri atau dengan bantuan petugas pasar (wawancara dengan Kepala Pasar Gede).

Kecuali sikap tenggang rasa dan toleransi, kepada para pedagang juga selalu ditekankan sikap gotong royong. Hal itu terlihat dalam berbagai segi. Dalam hal kebersihan, misalnya, para pedagang selalu berusaha untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar, sehingga Pasar Gede tampak bersih dan teratur. Ketertibanpun dijaga sedemikian rupa dengan kontrol yang ketat dari pengelola pasar. Kesigapan para petugas pasar dalam menangani berbagai masalah sangat mendukung terciptanya ketertiban di dalam pasar. Dalam pembayaran retribusi juga berjalan lancar. Para pedagang tampaknya menyadari sepenuhnya akan kewajiban mereka.

Semua itu tampaknya memang tidak terlepas dari cara pengelolaan pasar secara menyeluruh. Unsur pendidikan yang senantiasa dihadirkan dalam berbagai peraturan yang ada telah menciptakan kondisi yang sangat positif. Sebagai contoh yang sederhana, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang ada maka si pelanggar akan dipanggil oleh petugas pasar untuk diberi peringatan. Apabila telah beberapa kali diberi peringatan tetapi tetap masih melakukan pelanggaran, maka petugas pasar akan mencari apa sebab pelanggaran tersebut dilakukan. Seandainya terjadi kesengajaan maka masalahnya akan dilimpahkan kepada atasannya untuk diselesaikan menurut prosedur yang berlaku.

Sebenarnya walaupun para pedagang pasar tidak atau belum pernah diberi penataran P-4, mereka sudah menyerap nilai-nilai moral yang sesuai dengan Pancasila dan bahkan sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tidak mungkin bahwa kehidupanlah yang mengajarkan kepada mereka akan sikap-sikap terpuji terutama yang berkaitan dengan dunia mereka, yaitu dunia pasar. Para Pedagang tersebut memang mempunyai prinsip untuk meraih keuntungan yang

memadai, tetapi mereka melakukannya secara wajar. Semua itu memang tidak terlepas dari kepedulian masyarakat sekitar terhadap para pedagang tersebut. Berbagai pembinaan moral dilakukan oleh organisasi PKK dan organisasi atau instansi terkait lainnya. Berkaitan dengan hal itu maka tidak mengherankan bila Pasar Gede telah beberapa kali memenangkan lomba kebersihan. Hal itu tentunya akan mendorong para pedagang dan juga para petugas pasar untuk bekerja lebih baik lagi.

Satu hal yang juga tidak kurang pentingnya dalam unsur pembinaan sikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila adalah sikap dari Kepala Pasar yang menempatkan para pedagang dan petugas pasar lainnya sebagaimana mestinya selaku sesama insan Tuhan. Sebaliknya para pedagang juga bersikap demikian. Kondisi tersebut menciptakan keadaan saling membantu dalam menciptakan keadaan saling menghormati satu sama lain, sehingga mereka bisa saling membantu dalam menciptakan kehidupan pasar yang tertib, bersih dan aman. Semua itu tentu saja merupakan sumbangan yang sangat berarti dalam pembinaan kebudayaan nasional.

4.2.3. Pada Perumahan Swasta

Sebagaimana Koperasi dan Pasar, Perusahaan swasta juga merupakan salah satu bagian dari pranata ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan pada sebuah pabrik tekstil dan sebuah pabrik batik, diperoleh gambaran bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila tampak telah diamalkan dalam lembaga ekonomi tersebut. Dipenuhinya batasan upah minimum oleh perusahaan dan terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan para pekerjanya merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan butir-butir P-4. Para pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak secara khusus ditatar P-4, tetapi mereka selalu dituntut untuk bersikap moral sesuai dengan jiwa Pancasila. Para Pengusaha memberi contoh baik kepada para karyawannya dengan menerapkan kedisiplinan, menumbuhkan etos kerja dan menciptakan iklim kerja yang sehat. Sebaliknya karyawan pun menunjukkan kemauan kerja yang maksimal demi tercapainya target produksi yang telah ditetapkan (wawancara dengan pemilik pabrik tekstil dan pengusaha batik).

Adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hubungan pengusaha & karyawan kadang terjadi kesalahpahaman yang bukan tidak mungkin sampai mengakibatkan perselisihan. Atau kadang terjadi juga pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Untuk masalah-

masalah seperti itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar kesadaran kedua belah pihak. Sementara itu adanya sanksi bagi tindak pelanggaran tata tertib sampai pada pemotongan insentif bila itu memang diperlukan, pada dasarnya merupakan langkah untuk menciptakan kedisiplinan dan mempertahankan etos kerja yang telah diciptakan bersama.

Bagi para karyawan yang dipandang berprestasi mendapat penghargaan yang sesuai, misalnya dengan memberi kesempatan berkarya atau berprestasi dengan lebih baik lagi, memberi rangsangan atau intensif yang diharapkan dapat mendorong untuk berkarya dengan lebih giat lagi, dan lain-lain. Sebaliknya bagi karyawan yang kurang giat atau terkesan semaunya sendiri dalam bekerja, juga tersedia ganjaran. Adapun ganjaran tersebut dari yang berupa peringatan sampai yang paling ekstrim berupa pemutusan hubungan kerja. Tentu saja hukuman bagi karyawan itu disesuaikan dengan kadar kesalahan mereka. Jadi bukan asal menghukum dengan tindakan sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab.

Apa yang telah diuraikan di depan pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan hubungan industrial Pancasila, yaitu suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang bersifat saling menguntungkan. Dalam hal ini pengusaha (majikan) dengan pekerja berkapasitas sebagai mitra usaha.

Satu hal lagi yang juga merupakan aspek pembinaan moral Pancasila adalah bahwa perusahaan mengizinkan pembentukan serikat pekerja yang tergabung dalam SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Dengan demikian berarti perusahaan mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak para pekerjanya.

4.2.4. Pada Lembaga Pemerintah

Lembaga-lembaga pemerintah merupakan bagian dari pranata birokrasi yang bertugas mengelola administrasi negara. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kantor Kecamatan Jebres dan Kantor Depdikbud Kecamatan Jebres. Kedua lembaga pemerintah yang terletak di satu wilayah ini pada dasarnya memiliki corak pembinaan moral yang tidak berbeda satu sama lain. Disiplin dan tata tertib pegawai negeri ditegakkan sedemikian rupa. Dengan adanya sanksi bagi pelanggaran terhadap tata tertib pegawai negeri menandakan bahwa unsur pembinaan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembinaan moral pegawai negeri meliputi berbagai macam aspek seperti pembinaan kedisiplinan, prestasi dan lain-lain. Pembinaan

tidak hanya dilakukan melalui Latihan Pra Jabatan (LPJ) saja, tetapi juga melalui penataran P-4 dan serta pembinaan rutin yang dilakukan pada setiap upacara bendera, khususnya setiap tanggal 17 atau kesempatan lain.

Latihan Pra Jabatan dan Penataran P-4 secara khusus merupakan pembinaan moral dan sikap mental pegawai negeri. Hasil dari LPJ dan Penataran P-4 memang tidak dapat dilihat dalam sekejap, karena menyangkut perubahan perilaku. Oleh karena itu pada setiap kesempatan perlu dilakukan pembinaan (wawancara dengan Camat Jebres). Biasanya pada setiap upacara bendera selalu dilakukan pembinaan oleh pembina upacara. Kecuali itu juga diadakan pertemuan pada saat-saat tertentu yang dihadiri oleh seluruh staf. Pada kesempatan seperti itu tidak jarang dihadirkan ulama atau tokoh-tokoh lainnya yang diminta untuk mengadakan bimbingan moral terhadap para pegawai (wawancara dengan Camat Jebres dan pejabat Kantor Depdikbudcam Jebres).

Sebagai imbalan dari berbagai peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para abdi masyarakat, maka ada pula kontra prestasi atau ganjaran bagi pegawai yang berprestasi. Sebaliknya bagi pegawai yang kurang berprestasi juga akan mendapat teguran dan peringatan lainnya. Untuk pegawai yang tidak mentaati peraturan kantor tempatnya bekerja memang perlu pembinaan ekstra, apalagi bila teguran atau peringatan tidak begitu diperhatikan. Sebagai contoh kasus misalnya ada pegawai yang tidak mentaati disiplin kerja. Bila satu dua kali ditegur tetapi tidak ada perubahan, maka perlu diambil tindakan yang tepat, misalnya memanggil si pegawai untuk didengar alasannya. Setelah jelas permasalahannya baru dicarikan pemecahannya. Langkah ini biasanya disertai dengan membuat surat perjanjian bahwa pegawai yang bersangkutan tidak akan melanggar disiplin lagi. Seandainya masih terjadi pelanggaran, maka persoalan itu mau tidak mau harus dilaporkan kepada atasan yang lebih berwenang (wawancara dengan Camat Jebres).

Bila dibandingkan dengan pembinaan moral terhadap pegawai swasta, sudah barang tentu pembinaan moral pegawai negeri jauh lebih ketat. Tuntutan kepatuhan dan loyalitas pun jauh lebih besar. Hal yang demikian itu dikarenakan pada dasarnya pemerintah telah begitu berbaik hati kepada pegawai negeri. Antara lain dengan pemberian pensiun, bahkan setelah pegawai yang bersangkutan meninggal, masih ada pensiun janda. Bila si janda pegawai negeri meninggal, anak-anak mereka masih mendapat tunjangan sampai pada usia tertentu.

Pendek kata pegawai negeri harus bermoral Pancasila. Oleh karena itu pembinaan tidak pernah berhenti dilakukan. Pembinaan yang berkesinambungan dan terpadu diharapkan akan menghasilkan sikap mental yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Untuk itu diperlukan tidak hanya pembinaan psikis saja tetapi juga diperlukan pembinaan fisik secara mantap.

4.2.5. Pada Lembaga Keagamaan

Pada dasarnya lembaga keagamaan berfungsi melalui lembaga pesantren, gereja dan lain-lain. Untuk penelitian ini hanya lembaga pesantren dan gereja yang diambil sebagai sampel. Pada lembaga pesantren pembinaan kebudayaan nasional tampak dalam pembinaan moral pada santri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kepada para santri kecuali diajarkan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan juga diajarkan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan antar golongan/umat beragama. Para santri hidup terpisah dari keluarga mereka karena tinggal di pondok pesantren bersama santri-santri lainnya. Hal itu menuntut penyesuaian yang kadang-kadang tidak mudah. Dalam keadaan seperti itu bimbingan atau pembinaan dari Kyai mengenai pentingnya hidup bermasyarakat, saling menghormati dan menyayangi menjadi sangat penting. Mereka juga diajar untuk menghormati pemeluk agama lainnya serta berusaha untuk bekerjasama dengan mereka yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan kerukunan hidup seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat Pancasila. Para santri juga diajar untuk menjadi penyebar agama Islam yang tangguh tetapi tidak diperbolehkan memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Ajaran-ajaran Kyai yang bersifat duniawi ataupun yang berupa bekal untuk hidup bermasyarakat pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Walaupun penataran P-4 jarang dilakukan dalam pesantren tetapi para santri telah berusaha menjalankan ajaran-ajaran Kyai tentang hidup yang bersahaja, menjaga lingkungan dan punya kepedulian terhadap lingkungan sosial, mengembangkan sikap tenggang rasa, serta saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain.

Kecuali itu lembaga pesantren juga menerapkan peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh segenap santri. Pelanggaran terhadap tata tertib atau peraturan yang ada akan dikenakan sanksi yang bersifat mendidik. Hukuman-hukuman seperti mengisi bak mandi, member-

sihkan lingkungan pesantren dan lain-lain merupakan jenis hukuman yang memiliki nilai pendidikan. Dengan diberi hukuman kerja semacam itu para santri tidak semata-mata dihukum tetapi juga sekaligus dibina untuk menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dan sebagainya. Selain adanya hukuman bagi yang bersalah, bagi santri yang berprestasi juga ada hadiahnya walaupun hadiah tersebut tidak selalu berbentuk materi.

Sementara itu pada lembaga gerejapun tampaknya tidak banyak berbeda dari lembaga pesantren. Kepala gereja yang bertindak sebagai pembina umatnya mengajarkan tidak hanya nilai-nilai keagamaan saja tetapi juga nilai-nilai atau norma-norma dalam hidup bermasyarakat. Berbagai bimbingan dan ajaran untuk berbuat kebajikan di dunia ini pada dasarnya berintikan pengamalan butir-butir Ekaprasetia Pancakarsa. Salah satu bentuk pembinaan moral yang senantiasa dianjurkan kepada ummat adalah himbauan untuk selalu membantu sesama makhluk Tuhan, lebih-lebih bagi yang sedang tertimpa musibah. Ajaran untuk saling menghormati dan menyayangi sesamanya, tidak membedakan pangkat dan derajat, serta senantiasa mengamalkan kebaikan merupakan sajian rutin yang dimaksudkan sebagai pembinaan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Semua upaya pembinaan moral seperti yang telah diuraikan di depan merupakan pembinaan moral Pancasila. Sebagaimana telah disebutkan, Pancasila merupakan etos yang menjiwai unsur-unsur kebudayaan. Pancasila ibarat "nyawa" bagi kebudayaan nasional kita. Oleh karena itu pembinaan moral Pancasila terhadap berbagai lapisan masyarakat melalui unsur pendidikan yang ada dalam setiap lembaga merupakan usaha pembinaan terhadap kebudayaan nasional.

BAB V

ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN ANALISIS

5.1. Karakteristik Responden

Responden berjumlah 115 orang yang terdiri atas 71 pria (61,7%) dan 44 wanita (38,3%). Responden dari lembaga Pendidikan formal (LPF) berjumlah 36 orang (31,3%) dan dari Lembaga Pendidikan Non formal (LPN) berjumlah 79 orang (68,7%). LPF terdiri atas 19 pria (52,8%) dan 17 wanita (47,2%), sedangkan LPN terdiri atas 52 pria (65,8%) dan 27 wanita (34,2%). Lihat Tabel V.1 dan tabel V.2.

Tabel V.1. Latar Belakang jenis kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Pria	71	61,8
Wanita	44	38,3
Jumlah	115	100

Tabel V.2. Latar Belakang jenis kelamin menurut status Lembaga Pendidikan Responden (LPF dan LPN).

Jenis Kelamin	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pria	19	52,8	52	65,8
Wanita	17	47,2	27	34,2
Jumlah = 115	36	100	79	100

Tabel berikutnya (Tabel V.3.) merinci lebih lanjut komposisi kelamin tersebut menurut status lembaga Pendidikan Responden (LPF dan LPN) dan lembaga-lembaga khusus masing-masing.

Jenis Kelamin	LPF		LPN				
	SLTA	UNIV.	Kantor Pemerintah	Koperasi	Pasar	Persh Swasta	Lembg Agama
Pria	42,9% (9)	66,7% (10)	66,7% (14)	66,7% (4)	68,8% (11)	61,9% (13)	66,7% (10)
Wanita	57,1% (12)	33,3% (5)	33,3% (7)	33,3% (2)	31,2% (5)	38,1% (8)	33,3% (5)
n = 115	100% (21)	100% (15)	100% (21)	100% (6)	100% (16)	100% (21)	100% (15)

Usia responden berkisar antara 16 tahun hingga 61 tahun. Jumlah terbesar adalah responden yang berusia antara 16 tahun hingga 20 tahun, yaitu sebanyak 32 orang (27,8%). Jumlah responden yang berusia antara 56 tahun hingga 61 tahun adalah yang terkecil, yaitu hanya 4 orang (3,5%). Lihat tabel V.4.

Tabel V.4. Distribusi Frekuensi Usia Responden

Usia (tahun)	Frekuensi	%
16 - 20	32	27,8
21 - 25	17	14,8
26 - 30	10	8,7
31 - 35	15	13,0
36 - 40	14	12,2
41 - 45	8	7
46 - 50	10	8,7
51 - 55	5	4,3
56	4	3,5
	n = 115	100

Mayoritas responden beragama Islam, yaitu 85 orang (73,9%), sedangkan jumlah yang terkecil adalah responden yang beragama Budha, yaitu 2 orang (1,7%). Responden yang beragama Kristen Protestan berjumlah 14 orang (12,2%), katolik 11 orang (9,6%), dan Hindu 3 orang (2,6%). Lihat Tabel V.5.

Tabel V.5. Latar Belakang Agama Responden

Agama	Frekuensi	%
Islam	85	73,9
Protestan	14	12,2
Katolik	11	9,6
Hindu	3	2,6
Budha	2	1,7
	n = 115	100

Responden yang berpendidikan SLTA adalah yang terbanyak yaitu 43 orang (37,4%). Menyusul responden yang berpendidikan S-1 sebanyak 26 orang (22,6%). Jumlah terkecil adalah responden yang berpendidikan S-2, yaitu hanya 2 orang (1,7%). Lihat Tabel V.6.

Tabel V.6. Latar Belakang Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	%
S - 2	2	1,7
S - 1	26	22,6
Perguruan Tinggi	24	20,9
SLTA	43	37,4
SLTP	9	7,8
SD	11	9,6
	n = 115	100

Responden yang berasal dari luar P. Jawa hanya 1 orang (0,9%), sisanya yaitu 114 orang (99,1%) berasal dari P. Jawa. Dari 114 responden ini 103 orang (89,6%) lahir di Wilayah Jawa Tengah dan 51 orang diantaranya (44,3%) lahir di Surakarta. Lihat tabel V.7

Tabel V.7 Tempat lahir Responden

Tempat lahir	Frekuensi	%
Surakarta	51	44,3
Jawa Tengah (di luar Surakarta)	52	45,2
P. Jawa (di luar Jateng)	11	9,6
Luar P. Jawa	1	0,9
	n = 115	100

Responden yang ayahnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau karyawan swasta sebesar 38 orang (33%). Jenis pekerjaan tersebut adalah yang paling banyak digeluti. Sedangkan yang paling sedikit adalah ABRI, yaitu hanya 5 orang (4,4%). Jenis pekerjaan lainnya adalah petani 30 orang (26,1%), Wiraswasta 15 orang (13%), dan buruh tani 9 orang (7,8%). Sisanya yaitu 18 orang (15,7%) adalah pensiunan.

Ibu responden yang bekerja yaitu 65 orang (56,5%), memiliki pekerjaan sebagai berikut: pegawai negeri/karyawan swasta sebanyak 20 orang (17,4%), wiraswasta 18 orang (15,7%), petani 19 orang (16,5%), dan buruh tani 8 orang (7%). Sedangkan yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) mencapai jumlah 50 orang (43,4%). Lihat tabel V.8.

Tabel V.8

Pekerjaan	Ayah		Ibu	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
PNS/Karyawan Swasta	38	33	20	17,4
Petani	30	26,1	19	16,5
Wiraswasta	15	13	18	15,7
Buruh tani	9	7,8	8	7
ABRI	5	4,4	-	-
Pensiunan	18	15,7	-	-
Tidak bekerja (ibu rumah tangga)	-	-	50	43,4
	n = 115	100	n = 115	100

5.2. Dimensi Kognisi

Tidak ada responden yang menjawab bahwa mereka tidak pernah mendengar kata "Pancasila". Semua pernah mendengarnya. Perbedaan yang tampak dari jawaban mereka hanyalah pada tingkat intensitas mendengar kata tersebut. 76 responden (66,3%) menjawab "sering sekali", 36 responden (31,3%) menjawab "sering" sedangkan yang menjawab "kadang-kadang" hanya 3 orang (2,6%). Lihat tabel V.9 dan Tabel V.10

Tabel V.9 Jawaban Tentang Tingkat Intensitas Responden alam mendengar kata "Pancasila"

Tingkat Intensitas	Frekuensi	%
Sering sekali	76	66,1
Sering	36	31,3
Kadang-kadang	3	2,6
	n = 115	100

Tabel V.10 Jawaban tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "Pancasila" menurut status lembaga Pendidikan Responden

Tingkat Intensitas	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Sering sekali	28	77,8	48	60,8
Sering	8	32,2	28	35,4
Kadang-kadang	-	-	3	3,8
n = 115	36	100	79	100

Dari Tabel V.10 dapat dilihat bahwa prosentase jawaban yang tertinggi berasal dari para responden di lingkungan LPF, yaitu 77,8% (28 responden), sekaligus merupakan jawaban yang intensitasnya paling tinggi ("sering sekali"). Sebaliknya jawaban yang intensitasnya paling rendah ("kadang-kadang") dengan prosentase kecil pula (3,8%) diberikan oleh 3 responden dari lingkungan LPN.

Data tersebut menunjukkan bahwa:

1. Upaya pembinaan moral Pancasila, khususnya dari dimensi kognisi lebih gencar dilakukan di lingkungan LPF.
2. Sebagai konsekuensinya, intensitas mendengar kata "Pancasila" jelas lebih tinggi tingkatnya di lingkungan tersebut (LPF) dari pada lingkungan LPN.
3. Sebagai kesimpulan, tingkat pendidikan formal berkorelasi dengan tingkat pengenalan kata "Pancasila", sebab terbukti bahwa 3 responden yang menjawab hanya "kadang-kadang" saja mendengar kata "Pancasila" adalah para pedagang pasar yang hanya lulusan SD.

Tabel V.11. Jawaban Responden tentang arti kata "Pancasila" secara harafiah

Jawaban	Frekuensi	%
Lima azas, lima dasar	100	87
Pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dsb.	15	13
	n = 115	100

Data dari Tabel V.11. menunjukkan bahwa prosentase jawaban yang paling tepat terhadap arti kata "Pancasila" secara harafiah cukup tinggi, yaitu 87% (100 responden). Jika variabel Lembaga Pendidikan dimasukkan

ke dalam Tabel, maka akan terlihat bahwa prosentase jawaban yang paling tepat sebagian besar diberikan oleh para responden dari lingkungan LPP, yaitu 94,4% (34 responden). Sedangkan prosentase jawaban yang kurang tepat sebagian besar berasal dari responden di lingkungan LPN yaitu 16,5% (13 responden).

Tabel V.12. jawaban terhadap arti kata "Pancasila" menurut status Lembaga Responden (LPF dan LPN).

Jawaban	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Lima azas, lima dasar	34	94,4	66	83,5
Pandangan hidup, bangsa, falsafah bangsa, dsb.	2	5,6	13	16,5
n = 115	36	100	79	100

Semua responden mengaku pernah mendengar kata "P-4" dengan tingkat intensitas yang berbeda: 54% (64 responden) menjawab "sering sekali", 40% (46 responden) menjawab "sering", dan hanya 6% (7 responden) yang menjawab "kadang-kadang", lihat Tabel V.13.

Tabel V.13. Jawaban tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mendengar kata "P-4".

Tingkat Intensitas	Frekuensi	%
Sering sekali	62	54
Sering	46	40
Kadang-kadang	7	6
	n = 115	100

Apabila variabel status lembaga pendidikan responden dimasukkan ke dalam tabel, maka akan tampak bahwa prosentase terbesar dari jawaban yang memiliki tingkat intensitas paling tinggi diberikan oleh para responden dari LPF, yaitu sebanyak 55,6% (20 responden). Apabila dibandingkan dengan jawaban para responden dari lingkungan LPN perbedaannya tidak terlalu mencolok (55,6% berbanding 53,1%).

Namun demikian, jawaban yang tingkat intensitasnya paling rendah ("kadang-kadang") hanya diberikan oleh responden dari LPN, yaitu 7 orang (8,9%). Responden itu adalah para pedagang yang tingkat pendidikannya hanya SD. Lihat Tabel V.14.

Tabel V.14. Jawaban tentang Tingkat Intensitas Responden dalam mende-
ngar kata "P-4" menurut status Lembaga Pendidikannya (LPF & LPN)

Tingkat Intensitas	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Sering sekali	20	55,6	42	53,1
Sering	16	44,4	30	38
Kadang-kadang	-	-	7	8,9
n = 115	36	100	79	100

Tabel V.15. Jawaban tentang tingkat Pemahaman Responden
terhadap "P-4"

Jawaban	Frekuensi	%
Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila <i>dalam kehidupan sehari-hari</i>	99	86,1
Berbagai jawaban yang relevan tetapi <i>tidak mencantumkan penerapannya</i> dalam kehidupan sehari-hari	16	13,9
	n = 115	100

Data dalam Tabel V.15. menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap "P-4" cukup tinggi, 86,1% (99 responden) merupakan jawaban yang paling tepat. Tingkat pemahaman ini kurang lebih sama dengan tingkat pemahaman terhadap arti "Pancasila" secara harafiah, yaitu 87% (lihat Tabel V.11.)

Jika variabel status lembaga pendidikan responden dimasukkan ke dalam tabel, maka akan tampak bahwa perbandingan tingkat pemahaman para responden dari kedua lembaga pendidikan tersebut (LPF dan LPN) tidak begitu berbeda, yaitu 88,9% berbanding 84,8% untuk jawaban yang paling tepat, dan 11,1% berbanding 15,2% untuk jawaban yang kurang tepat. lihat Tabel V.16.

Tabel V.16. Jawaban tentang Tingkat Pemahaman Responden terhadap "P-4" menurut status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Jawaban	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila <i>dalam kehidupan sehari-hari</i>	32	88,9	67	84,8
Berbagai jawaban yang relevan tetapi <i>tidak mencantumkan penerapannya</i> dalam kehidupan sehari-hari	4	11,1	12	15,2
n = 115	36	100	79	100

Responden dari LPF yang jawabannya kurang tepat adalah 4 pelajar SLTA. Sedangkan 12 responden dari LPN yang jawabannya kurang tepat terdiri atas 4 pedagang pasar yang berpendidikan SD dan 2 petugas pasar yang juga berpendidikan SD 6 karyawan perusahaan yang berpendidikan SD (5 orang) dan SLTP (1 orang).

Data yang tersaji dalam 8 Tabel (Tabel V.9, V.10, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16) di atas, yang khusus menyangkut dimensi kognisi, ini mengungkapkan beberapa hal yaitu:

1. Tingkat pengetahuan responden terhadap Pancasila cukup tinggi
2. Upaya pembinaan Pancasila lebih intensif dilakukan di LPF dari pada PLN
3. Tingkat pendidikan formal berkorelasi secara positif dengan tingkat pengetahuan responden tentang Pancasila.

5.3. Dimensi Afeksi.

5.3.1. "Menurut pendapat anda, orang dari golongan agama manakah yang paling cocok untuk dijadikan sahabat Anda?"

Ini adalah salah satu pertanyaan dalam kuesioner yang diramu dari butir-butir "P-4" yaitu:

- (1). Butir "b" dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa: "Hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- (2). Butir "e" dari sila Persatuan Indonesia: "Menunjukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda agama sudah mencakup nilai-nilai yang ada dalam kedua butir tersebut. Hal itu disebabkan persahabatan adalah bentuk yang paling akrab dan itu dapat mewakili berbagai bentuk interaksi sosial.

Tabel V.17. Jawaban mengenai Tingkat keterbukaan Responden dalam memilih sahabat yang berbeda Golongan Agama

Tingkat Keterbukaan	Frekuensi	%
Terbuka terhadap semua golongan agama	102	88,7
Terbuka terhadap beberapa golongan agama	6	5,2
Terbuka terhadap satu golongan agama	4	3,5
Terbuka hanya terhadap <u>golongan agama sendiri</u>	3	2,6
	n = 115	100

Dalam Tabel V.17 tampak mencolok adanya sikap terbuka responden dalam memilih sahabat yang berbeda agama: 88,7% jawaban (102 responden) mengungkapkan sikap yang paling terbuka, sedangkan sikap yang paling tertutup hanya 2,6% (3 responden).

Tabel V. 18. Jawaban mengenai Tingkat Keterbukaan responden dalam memilih sahabat yang berbeda golongan Agama menurut status lembaga Pendidikan Responden.

Tingkat Keterbukaan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Terbuka terhadap semua golongan agama	33	91,7	69	87,3
Terbuka terhadap berbagai golongan agama	2	5,5	4	5,1
Terbuka terhadap satu golongan agama	1	2,8	3	3,8
Terbuka hanya terhadap golongan agama sendiri	0	0	3	3,8
n = 115	36	100	79	100

Dalam Tabel V. 18 terlihat bahwa sikap yang paling tertutup tadi berasal dari 3 responden di lingkungan LPN. Dari catatan yang ada, ketiga responden tersebut terdiri atas seorang pedagang pasar yang berpendidikan SLTA dan dua orang karyawan perusahaan yang berpendidikan SLTP. Sementara itu prosentase sikap yang paling terbuka di antara kedua lembaga itu (LPF dan LPN) tidak jauh berbeda, yaitu 91,7% berbanding 87,3%.

5.3.2. "Apakah anda merasa berkewajiban untuk membantu orang yang ditimpa bencana (alam, penyakit, kelaparan, atau perang) meskipun berbeda kebangsaan?"

Pertanyaan dari kuesioner ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "a" dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: "Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia".
- (2). Butir "b" dari sila yang sama: "Saling mencintai sesama manusia".

Merasa berkewajiban untuk membantu orang yang ditimpa bencana meskipun berbeda kebangsaan tentu saja merupakan sikap yang dilandasi oleh rasa cinta terhadap sesama manusia. Dengan demikian pertanyaan ini mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam kedua butir tersebut.

Tabel V.19. Jawaban Responden tentang Rasa wajib membantu orang yang ditimpa bencana meskipun berbeda kebangsaan.

Jawaban	Frekuensi	%
ya	112	97,4
tidak	3	2,6
	n = 115	100

Hampir seluruh responden (dalam Tabel V.19) merasa wajib untuk membantu orang yang ditimpa bencana meskipun berbeda kebangsaan. Ada 112 responden (97,4%) yang memberi jawaban "ya". Sementara itu responden yang bersikap tertutup hanya berjumlah 3 orang (2,6%).

Tabel V.20. Jawaban Responden tentang rasa wajib membantu orang yang ditimpa Bencana meskipun berbeda kebangsaan, menurut status lembaga pendidikannya (LPF dan LPN).

Jawaban	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
ya	34	94,4	78	98,7
tidak	2	5,6	1	1,3
n = 115	36	100	79	100

Dalam Tabel V.20, prosentase jawaban positif justru lebih besar di lingkungan LPN daripada di lingkungan LPF, meskipun perbedaannya tidak mencolok yaitu 98,7% berbanding 94,4%. Demikian juga, prosentase jawaban negatif justru lebih banyak di kalangan LPF daripada di kalangan LPN, dengan perbandingan 5,6%:1,3%. Tiga responden yang memberikan jawaban negatif adalah dua pelajar SLTA (dari LPF) dan seorang karyawan perusahaan (dari LPN) yang berpendidikan SLTP.

Namun demikian jawaban negatif ini menjadi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan jawaban positif, sebab persentasenya berbanding secara mencolok yakni 2,6% berbanding 97,4% (lihat Tabel, V.19).

5.3.3. "Dalam suatu rapat kelurahan, seorang warga yang menganut agama lain dan berasal dari pulau lain mengajukan suatu usul. Apakah anda akan menyetujuinya apabila usul tersebut bermanfaat bagi kemajuan kelurahan anda?"

Pertanyaan di atas diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "b" dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa: "Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup".
- (2). Butir "a" dari sila Persatuan Indonesia: "menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan".

Meskipun pertanyaan di atas hanya mencakup lingkup kecil (tingkat kelurahan) tetapi lingkup yang kecil tersebut merupakan basis dari lingkup yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir P-4 di atas sudah tercakup dalam pertanyaan tersebut.

Tabel V.21. Sikap Responden dalam menanggapi usul yang bermanfaat bagi kemajuan kelurahan dari orang yang berbeda Agama dan suku bangsa.

Sikap	Frekuensi	%
Setuju	114	99,1
Tidak setuju	1	0,9
	n = 115	100

Dalam Tabel V.21. hanya satu responden (0,9%) yang menunjukkan sikap negatif, sedangkan 114 responden (99,1%) memperlihatkan sikap terbuka untuk bekerjasama dengan orang yang berbeda agama dan suku bangsa, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Tabel V.22. Sikap responden dalam menanggapi usul yang bermanfaat bagi kemajuan kelurahan, dari orang yang berbeda Agama dan suku bangsa, menurut status lembaga pendidikannya (LPF dan LPN).

Sikap	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Setuju	36	100	78	98,7
Tidak setuju	-	-	1	1,3
n = 115	36	100	79	100

Dari Tabel V.22. tampak bahwa perbedaan prosentase jawaban positif antara responden-responden dari kedua lembaga pendidikan tersebut hampir tidak ada (hanya 1,3%, meskipun responden dari LPF memperlihatkan sikap yang 100% menyetujuinya. Dengan demikian berarti menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung pada kedua butir P-4 tersebut.

5.3.4. "Ada pendapat yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu wadah ekonomi yang mengutamakan semangat gotong royong. Bagaimanakah pendapat Anda?" Pertanyaan itu diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir 'a' dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: "Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan".
- (2). Butir "1" dari sila yang sama: "Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial".

Tabel V.23. Pendapat Responden tentang Koperasi sebagai wadah Ekonomi yang mengutamakan Semangat kekeluargaan dan Gotongroyong.

Pendapat	Frekuensi	%
Setuju	115	100
Tidak setuju	-	-
	n = 115	100

Seluruh responden, baik dari LPF maupun dari LPN memberi pendapat yang positif terhadap lembaga sosial ekonomi ini. Hal itu berarti bahwa nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kemajuan yang merata, dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir P-4 tersebut merupakan bagian dari sistem nilai yang dianut oleh para responden.

5.3.5. "Memberikan sebagian dari milik atau penghasilan Anda kepada fakir miskin merupakan perbuatan terpuji. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu?"

Pertanyaan di atas diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "a" dari Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: "Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan".
- (2). Butir "e" dari sila yang sama: "Suka memberi pertolongan kepada orang lain".

Tabel V.24. Pendapat Responden tentang Perbuatan Amal terhadap Fakir Miskin sebagai perbuatan terpuji

Pendapat	Frekuensi	%
Setuju	113	98,3
Tidak setuju	2	1,7
	n = 115	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 98,3% jawaban setuju atas pendapat bahwa perbuatan amal terhadap fakir miskin adalah perbuatan terpuji. Sementara itu dari Tabel V.25. di bawah ini tampak bahwa dua responden yang tidak setuju adalah dari lingkungan LPN.

Tabel V.25. Pendapat Responden tentang Perbuatan Amal terhadap Fakir miskin sebagai perbuatan terpuji. Menurut Status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Pendapat	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Setuju	36	100	77	98,3
Tidak setuju	-		2	1,7
n = 115	36	100	79	100

5.3.6. "Beberapa orang membicarakan cara mencari nafkah yang paling sesuai dengan keadaan masa kini"

- orang pertama berpendapat bahwa bekerja sebagai apa saja, asal bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, dan giat pasti bisa dicapai hasil yang baik;
- orang kedua berpendapat bahwa ia suka pekerjaan yang ringan, juga yang kurang mewajibkan kerja ketat dan memberikan waktu longgar untuk mencari penghasilan lain;
- orang ketiga berpendapat bahwa ia suka pekerjaan yang tidak perlu memberikan penghasilan banyak tetapi memberi gengsi dan kedudukan.

Menurut pendapat Anda, dari ketiga pendapat di atas, manakah yang paling cocok buat Anda?"

Pertanyaan itu diramu dengan dari butir "j" dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

"Suka bekerja keras".

Tabel V.26. Pilihan Responden tentang cara Mencari Nafkah Paling sesuai dengan keadaan masa kini.

Cara Mencari Nafkah	Frekuensi	%
Pekerjaan apa saja, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, dan giat akan diperoleh hasil yang baik	110	95,6
Pekerjaan serabutan, tanpa kewajiban ketat, hasil pasti baik	4	3,5
Hasil tidak terlalu dipentingkan daripada gengsi	1	0,9
	n = 115	100

Tabel V. 26. Menunjukkan bahwa sebagian besar responden (110 orang atau 95,6%) menjunjung tinggi nilai kerja keras sebagaimana yang tercantum dalam butir "e" dari sila ke-5 tersebut.

Tabel V.27. Pilihan Responden tentang cara Mencari Nafkah Paling sesuai dengan keadaan masa kini, menurut status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Cara Mencari Nafkah	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pekerjaan apa saja, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, giat, akan diperoleh hasil yang baik	34	94,4	76	96,2
Pekerjaan serabutan, tanpa kewajiban ketat, hasil pasti baik	1	2,8	3	3,8
Hasil tidak terlalu penting dibandingkan gengsi	1	2,8	-	-
n = 115	36	100	79	100

Pilihan yang dapat dikatakan paling negatif (tabel 27) diberikan oleh seorang responden dari LPF yang berpendidikan SLTA.

5.3.7. "Bali merupakan salah satu tujuan wisata di Tanah Air yang paling dikenal di dunia Internasional, Kekayaan dan ketinggian mutu budayanya (misal Seni Tari, seni ukir, seni arsitektur, dan upacara keagamaan) merupakan modal utama propinsi ini dalam menjangkau wisatawan manca negara".

- a. "Apakah Anda turut merasa bangga atas ketenaran nama Bali di manca negara?"
- b. "Apakah Anda turut merasa bangga atas kekayaan dan ketinggian mutu budaya Bali?"

Kedua pertanyaan ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "c" dari sila Persatuan Indonesia: "cinta Tanah air dan Bangsa".
- (2). Butir "d" dari sila yang sama: "Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah Air Indonesia".
- (3). Butir "k" dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia": "Menghargai hasil karya orang lain".

Tabel V.28. Sikap responden terhadap ketenaran P. Bali di manca negara.

Sikap	Frekuensi	%
Bangga	112	97,3
Tidak bangga	3	2,6
	n = 115	100

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 3 responden (2,6%) yang tidak merasa bangga atas ketenaran P. Bali di manca negara. Sementara itu 112 responden (97,3%) turut merasa bangga, meskipun tidak satupun diantara para responden itu yang berasal dari Bali.

Tabel V.29. Sikap Responden Terhadap Ketenaran P. Bali di mancanegara, menurut status Lembaga Pendidikan (LPF dan LPN).

Sikap	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bangga	36	100	76	96,2
Tidak bangga	-	-	3	1,3
n = 115	36	100	79	100

Tabel V.29. Menunjukkan bahwa ketiga responden yang tidak turut merasa bangga berasal dari LPN. Prosentase negatif yang tidak berarti ini mengungkapkan bahwa sebagian besar responden (97,3%) menganggap P. Bali adalah bagian dari Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai cinta Tanah Air dan Bangsa sebagaimana yang tercantum dalam butir "c" dan "d" di atas adalah nilai-nilai yang dihayati oleh sebagian besar responden.

Tabel V.30. Sikap Responden terhadap ketinggian mutu budaya Bali

Sikap	Frekuensi	%
Bangga	110	95,7
Tidak bangga	5	4,3
	n = 115	100

Data dari tabel V.30. tidak jauh berbeda dengan data tabel 28. Di sini terdapat 5 responden (4,3%) yang tidak merasa turut bangga akan prestasi P. Bali di bidang kebudayaan. Sementara prosentase sikap yang positif mencapai 95,7%.

Tabel V.31. Sikap responden terhadap ketinggian mutu budaya Bali, menurut Status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Sikap	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bangga	36	100	74	93,7
Tidak Bangga	-	-	5	6,3
n = 115	36	100	79	100

Prosentase sikap positif para responden di lingkungan LPF adalah 100% (tabel V.31.), sedangkan di lingkungan LPN hanya 93,7%. Kelima responden yang memperlihatkan sikap tidak bangga (6,3%) terdiri atas 3 orang pedagang pasar yang hanya berpendidikan SD dan 2 orang karyawan perusahaan yang berpendidikan SLTP.

Meskipun demikian, prosentase sikap negatif ini menjadi tidak berarti bila dibandingkan dengan prosentase sikap positif. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden (95,7%) menghayati nilai-nilai cinta tanah air dan bangsa, dan menghargai hasil karya orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam butir P-4 tersebut.

5.3.8. "Menurut pendapat Anda, apakah bahasa daerah (bahasa Jawa, bahasa Batak, Bahasa Bugis, dan sebagainya) perlu dilestarikan dan dikembangkan?"

Pertanyaan ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "c" dari Sila Persatuan Indonesia: "Cinta Tanah Air dan Bangsa".
- (2). Butir "d" dari sila yang sama: "Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia".

• Tabel V.32. Pendapat Responden tentang perlunya pelestarian bahasa daerah

Pendapat	Frekuensi	%
Setuju	114	99,1
Tidak setuju	1	0,9
	n = 115	100

Dari tabel V.32. di atas tampak bahwa hampir seluruh responden bersikap positif terhadap pelestarian bahasa daerah (114 responden atau 99,1%). Satu-satunya Responden yang tidak setuju terhadap bahasa daerah adalah responden yang berasal dari lingkungan LPF yang berpendidikan S-2. Ini tentunya merupakan suatu perkecualian.

Tabel V.33. Alasan Responden tentang Pelestarian & Pengembangan Bahasa Daerah. Menurut: Status Pendidikannya (LPF dan LPN).

Alasan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bahasa Daerah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia/akar dan aset kebudayaan nasional	27	75	42	53,2
Bahasa Daerah merupakan warisan nenek moyang yang mengandung nilai-nilai sopan santun dan tata krama, dan merupakan ciri khas suatu daerah	7	19,4	29	36,7
Bahasa Daerah adalah bahasa ibu yang dapat mengkomunikasikan perasaan dan emosi	2	5,6	8	10,1
n = 115	36	100	79	100

Dalam tabel V.33 terlihat bahwa prosentase tertinggi adalah alasan untuk memperkaya bahasa Indonesia dan bahasa Daerah merupakan akar dan aset kebudayaan nasional, baik di lingkungan LPF (75%) maupun di lingkungan LPN (53,2%). Sementara itu prosentase terendah adalah alasan bahwa bahasa daerah adalah bahasa ibu yang dapat mengkomunikasikan perasaan dan emosi, baik di lingkungan LPF (5,6%) maupun di lingkungan LPN (10,1%). Kesejajaran ini mengartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya dalam butir-butir P-4 di atas benar-benar merupakan nilai-nilai yang dihayati sebagian besar responden.

Dari tabel-tabel yang disajikan dalam bagian “Dimensi afeksi” ini (sub-sub bab 5.3) tampak bahwa:

- (1). Prosentase jawaban positif para responden cukup tinggi, yaitu berkisar antara 87% hingga 100%.
- (2). Tingkat prosentase jawaban positif para responden dari kedua lembaga pendidikan tersebut (LPF dan LPN) relatif berimbang.

Berdasarkan dua hal di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan moral Pancasila di kedua lembaga pendidikan tersebut sangat berhasil, khususnya hingga tingkat penghayatan (dimensi afeksi).

5.4. Dimensi Psiko-motorik

5.4.1. "Apakah Anda memiliki sahabat yang berbeda agama?"

Pertanyaan ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "b" dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa: "Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup".
- (2). Butir "e" dari sila Persatuan Indonesia: "Memajukan pergaulan demi persatuan dan Kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Nilai-nilai tersebut tidak hanya dihayati sebagaimana yang disajikan dalam sub-sub bab 5.3. (Dimensi afeksi), tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sosial. Tabel V.34. akan menyajikan segi penerapan nilai-nilai dari kedua butir P-4 tersebut.

Tabel V.34. Responden yang memiliki sahabat yang berbeda Agama.

Jumlah sahabat yang berbeda agama	Frekuensi	%
Lebih dari 5 orang	58	50,4
4 - 5 orang	9	7,8
2 - 3 orang	32	27,8
1 orang	5	4,3
Tidak mempunyai sahabat yang berbeda agama	11	9,6
	n = 115	100

Dari data pada tabel V.34 di atas tampak bahwa prosentase tertinggi (50,4%) adalah responden yang memiliki sahabat beda agama yang terbanyak (lebih dari 5 orang). Sedangkan prosentase terendah (4,3%) adalah responden yang memiliki satu orang sahabat yang berbeda agama. Sementara itu prosentase responden yang tidak memiliki sahabat yang berbeda agama cukup signifikan (9,6%), karena lebih tinggi daripada prosentase responden yang memiliki sahabat yang berbeda agama sebanyak 4 - 5 orang (7,8%).

Tabel V. 35. Responden yang memiliki sahabat yang berbeda agama, menurut status pendidikannya (LPF dan LPN)

Jumlah sahabat yang	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Lebih dari 5 orang	13	36,1	44	55,7
4 - 5 orang	2	5,5	6	7,6
2 - 3 orang	17	47,2	17	2,5
1 orang	2	5,5	3	3,8
Tidak memiliki saha- bat yang beda agama	2	5,5	9	11,4
n = 115	36	100	79	100

Dalam tabel V.35 tampak bahwa prosentase tertinggi adalah jawaban dari para responden di lingkungan LPN (55,7%) yang mempunyai sahabat beda agama dalam jumlah yang paling besar (lebih dari 5 orang). Prosentase tertinggi untuk jawaban para responden dari lingkungan LPF adalah 47,2%, yaitu responden dari lingkungan LPF adalah 47,2%, yaitu responden yang memiliki sahabat beda agama dalam jumlah 2 - 3 orang. Dengan demikian perbedaan tingkat prosentase untuk jawaban yang paling positif (responden yang memiliki sahabat beda agama dalam jumlah lebih dari 5 orang) antara responden-responden dari LPF dan LPN cukup tinggi, yaitu 36,1% berbanding 55,7%. Sebaliknya prosentase responden dari LPF yang tidak memiliki sahabat yang berbeda agama, jauh lebih rendah daripada prosentase responden dari LPN yang tidak memiliki sahabat yang berbeda agama. Hal itu jauh lebih rendah daripada prosentase responden dari LPN yang tidak mempunyai sahabat yang berbeda agama, yaitu 5,5% berbanding 11,4%.

Kesebelas responden yang tidak memiliki sahabat yang berbeda agama ini tidak harus ditafsir bahwa mereka menolak menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda agama. Data dari tabel V.17 dan V.18 di muka menunjukkan bahwa hanya ada 3 orang responden yang bersikap demikian. Ada kemungkinan bahwa 8 dari 11 responden tersebut tinggal dan banyak berkecimpung di lingkungan orang-orang yang seagama. Dugaan ini dapat diperkuat dengan data bahwa 11 responden tersebut beragama Islam, yaitu agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Surakarta, kota yang menjadi lokasi penelitian ini.

Kesebelas responden tersebut terdiri atas 2 orang pelajar SLTA dari LPF dan 9 orang responden dari LPN (1 pedagang pasar yang berpendidikan SLTA, 2 karyawan perusahaan yang berpendidikan SLTP dan 6 murid pesantren).

Mengingat mayoritas warga kota yang menjadi lokasi penelitian ini beragama Islam, maka prosentase responden yang memiliki sahabat beda agama (dari 1 hingga lebih dari 5 orang) cukup signifikan (90,4%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden tidak hanya menghayati tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua butir P-4 di atas.

5.4.2. "Apakah Anda berkepentingan dalam kegiatan sosial (kerja bakti) di lingkungan RT/RW/Kelurahan?"

Pertanyaan ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "c" dari sila Persatuan Indonesia: "memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka Tunggal Ika".
- (2). Butir "a" dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan": "Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat".

Tabel V. 36. Partisipasi Responden dalam kegiatan sosial (kerja bakti) di lingkungan RT/RW/Kelurahan.

Partisipasi	Frekuensi	%
ya	112	97,4
tidak	3	2,6
	n = 115	100

Terdapat 3 responden (dalam tabel V.36) yang tidak ikut melakukan kerja bakti. Mereka adalah para pedagang pasar yang oleh karena kesibukannya, sukar mencari waktu untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut.

Tabel V.37. Tingkat Partisipasi Responden dalam kegiatan sosial (kerja bakti) di lingkungan RT/RW/Kelurahan. Menurut status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Tingkat Partisipasi	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
sering	19	52,8	58	73,4
kadang-kadang	17	47,2	18	22,8
tidak	-	-	3	3,8
n = 115	36	100	79	100

Prosentase tingkat partisipasi yang paling tinggi (sering) adalah dari responden LPN (73,4%), sedangkan dari responden LPF hanya 52,8%. Alasan utama para responden dari LPF bahwa mereka terlalu sibuk mengikuti kegiatan intra dan ekstra kurikuler sehingga sulit meluangkan waktu untuk ikut kerja bakti.

- 5.4.3. "Apakah Anda adalah anggota dari organisasi di bawah ini:
- Organisasi yang menyalurkan bakat dan minat atau yang bergerak di bidang kemanusiaan seperti pramuka, kelompok pecinta alam, kelompok kesenian, klub olah raga, resimen mahasiswa dan lain-lain.
 - Organisasi kemasyarakatan yang berazaskan agama seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya
 - Organisasi yang berkiprah di bidang politik seperti HMI, GMNI, GMKI, AMPI, KNPI dan lain-lain.

Pertanyaan tersebut diramu dari butir-butir P-4 yang tercantum dalam sub-sub bab 5.4.1. yaitu butir "e" dari sila Persatuan Indonesia dan butir "a" dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Tabel V.38. Keanggotaan Responden dalam satu atau lebih organisasi.

Anggota satu atau lebih organisasi	Frekuensi	%
ya	82	71,3
tidak	33	28,7
	n = 115	100

Dalam tabel V.38 terdapat 82 responden atau (71,3%) yang merupakan anggota dari satu atau lebih organisasi sebagaimana tersebut di atas. Sisanya, yaitu 33 responden (28,7%) tidak terlibat dalam berbagai organisasi tersebut.

Tabel V.39 Keanggotaan Responden dalam satu atau lebih organisasi. Menurut status Lembaga Pendidikannya (LPF dan LPN).

Anggota dari satu	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
ya	34	94,4	48	60,8
tidak	2	5,6	31	39,2
n = 115	36	100	79	100

Tabel V.39 memperlihatkan bahwa tingkat prosentase jawaban positif dari para responden di lingkungan LPF jauh lebih tinggi daripada para responden LPN, yaitu 94,4% berbanding 60,8%. Demikian pula tingkat prosentase jawaban negatif dari para responden di lingkungan LPN, yaitu 5,6% berbanding 39,2%.

5.4.4. "Dalam berbagai organisasi tersebut, cara manakah yang sering ditempuh dalam: a. menyusun kegiatan/program; b. memecahkan masalah?"

Pertanyaan ini diramu dari butir "c" dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: "Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama".

Tabel V.40. Cara Pengambilan Keputusan dalam menyusun Program

Cara pengambilan keputusan	Frekuensi	%
Musyawarah	74	90,2
Suara terbanyak	5	6,1
menyerahkan kepada pimpinan	3	3,7
	n = 82	100

Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah memperoleh tingkat prosentase tertinggi, yaitu 90,2%. Sementara itu cara pengambilan keputusan dengan menyerahkan kepada pimpinan hanya sebesar 3,7%.

Tabel V.41. Cara Pengambilan Keputusan dalam menyusun program, menurut status lembaga pendidikannya (LPF dan LPN).

Cara pengambilan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Musyawarah	30	88,2	44	91,6
Suara terbanyak	3	8,8	2	4,2
Menyerahkan kepada pimpinan	1	3	2	4,2
	n = 82	100	48	100

Tingkat prosentase cara pengambilan keputusan lewat musyawarah sedikit lebih tinggi di lingkungan LPN daripada di lingkungan LPF, yaitu 91,6% berbanding 88,2%. Sebaliknya tingkat prosentase cara pengambilan keputusan dengan menyerahkan kepada pimpinan sedikit lebih rendah di lingkungan LPF daripada di lingkungan LPN, yaitu 3% berbanding 4,2%.

Tabel V.42. Cara pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah

Cara pengambilan keputusan	Frekuensi	%
Musyawarah	78	95,1
Suara terbanyak	3	3,7
Menyerahkan pada pimpinan	1	1,2
	n = 82	100

Dalam tabel V.42 dapat dilihat bahwa prosentase tertinggi, yaitu 95,1% adalah cara pengambilan keputusan lewat musyawarah. Sedangkan prosentase terendah dari cara pengambilan keputusan dengan menyerahkannya kepada pimpinan, yaitu 1,2%.

Tabel V.43. Cara pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah, menurut status lembaga pendidikan responden (LPF dan LPN).

Cara pengambilan keputusan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Musyawarah	33	97,1	45	93,8
Suara terbanyak	1	2,9	2	4,2
Menyerahkan pada pimpinan	-	-	1	2,0
n = 82	34	100	48	100

Perbedaan prosentase antara responden dari LPF dan LPN sangat kecil, yaitu 97,1% berbanding 93,8%. Untuk cara pengamabilan keputusan lewat musyawarah, 2,9% berbanding 4,2% untuk cara kedua, sedangkan cara ketiga yaitu 2,0% hanya dijumpai pada responden dari LPN.

5.4.5. "Apakah Anda pernah berselisih:

- dengan tetangga di lingkungan RT/RW?
- dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan?
- dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan organisasi?

Pertanyaan ini diramu dari butir "i" dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: "Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum".

Tabel V.44. Konflik dengan Kerabat/tetangga di lingkungan RT/RW

Konflik	Frekuensi	%
tidak pernah	96	83,5
pernah	19	16,5
	n = 115	100

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 16,5% dari jumlah responden pernah terlibat konflik. Angka itu cukup signifikan untuk ditelusuri.

Tabel V.45. Tingkat Intensitas Konflik dengan Kerabat/tetangga di lingkungan RT/RW.

Tingkat intensitas	Frekuensi	%
Pernah 1 kali	10	52,6
pernah 2 kali	6	31,6
pernah lebih 2 kali	3	15,8
	n = 19	100

Dari tabel di atas tampak bahwa 52,6% responden pernah konflik sebanyak satu kali, 31,6%, sebanyak 2 kali, dan 15,8% lebih dari dua kali.

Tabel V.46. Tingkat intensitas konflik dengan tetangga/kerabat di lingkungan RT/RW, menurut status Lembaga Pendidikan responden (LPF dan LPN).

Tingkat intensitas	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pernah 1 kali	5	50	5	55,6
Pernah 2 kali	2	29	4	41,4
Pernah lebih 2 kali	3	30	-	-
n = 19	10	100	9	100

Dalam tabel V.46 tampak bahwa tingkat prosentase yang tertinggi yaitu 50% (LPF) dan 55,6% (LPN) mengacu pada tingkat intensitas yang terendah, yaitu satu kali. Sementara itu, tingkat intensitas tertinggi yaitu lebih dari 2 kali hanya terdapat pada LPF (3 responden).

Tabel V.47. Jenis konflik menurut status lembaga Pendidikan Responden.

Jenis konflik	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bermusuhan tetapi sebatas tidak saling tegur	6	60	4	44,4
Adu mulut	2	20	5	55,6
Adu fisik	1	10	-	-
Adu fisik dengan menggunakan alat	1	10	-	-
n = 19	10	100	9	100

Prosentase tertinggi adalah permusuhan tetapi sebatas tidak saling tegur, yaitu 60% (tabel V.47). Hal ini terjadi pada responden di lingkungan LPF. Sementara itu prosentase tertinggi di lingkungan LPN adalah konflik yang lebih parah yaitu adu fisik dan adu fisik disertai penggunaan alat, terjadi di LPF dengan persentasi masing-masing 10%.

Tabel V.48. Cara Penyelesaian konflik, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Cara penyelesaian	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Keluargaan	9	90	9	100
Hukum	1	10	-	-
n = 19	10	100	9	100

Seluruh responden telah menyelesaikan konflik masing-masing seperti tampak dalam tabel V.48. Penyelesaian konflik dari responden di lingkungan LPN 100% secara keluargaan, sedangkan di kalangan LPF ada satu responden, yang menyelesaikan konflik secara hukum.

Tabel V.49. Konflik dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan

Konflik	Frekuensi	%
Tidak pernah	71	61,7
Pernah	44	38,3
n = 115		100

Tingkat konflik di lingkungan sekolah/pekerjaan seperti tampak pada tabel V.49. Ternyata cukup tinggi, yaitu 38,8%.

Tabel V.50. Konflik dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan, menurut Status Lembaga Pendidikan Responden

Konflik	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak pernah	17	47,2	54	68,4
pernah	19	52,8	25	31,6
n = 115	36	100	79	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa 52,8% dari responden di lingkungan LPF pernah terlibat konflik dengan rekan/atasan/bawahan di lingkungan sekolah/pekerjaan mereka. Sementara itu dari responden di lingkungan LPN hanya 31,6% yang pernah terlibat konflik. Secara keseluruhan 61,7% (71 responden) pernah terlibat konflik, sedangkan 38,3% (44 responden) tidak pernah terlibat konflik (lihat tabel 49).

Tabel V.51. Jenis konflik menurut Status Pendidikan Responden.

Jenis konflik	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Permusuhan sebatas tidak saling menegur	11	57,9	15	60
Adu mulut	6	31,5	10	40
Adu fisik	1	5,3	-	-
Adu fisik dengan menggunakan alat	1	5,3	-	-
n = 44	19	100	25	100

Dari tabel di atas tampak bahwa sikap bermusuhan sebatas tidak saling tegur tidak begitu berbeda antara LPF dan LPN, yaitu 57,9% berbanding 60%. Namun jenis konflik yang paling negatif, yaitu adu fisik dan adu fisik dengan menggunakan alat kembali hanya terdapat pada responden di kalangan LPF, masing-masing satu orang.

Tabel V.52. Cara penyelesaian konflik, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Cara penyelesaian	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Keluarga	15	88,2	19	95
Hukum	2	11,8	1	5
n = 37	17	100	20	100

Sebagian besar penyelesaian konflik adalah dengan cara keluarga, yaitu 88,2% (LPP) dan 95% (LPN). Responden yang belum menyelesaikan konflik ada 7 orang yaitu 2 responden dari kalangan LPF dan 5 responden dari kalangan LPN.

Tabel V.53. Konflik di lingkungan Organisasi Menurut status Lembaga Pendidikan Responden

Konflik	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak pernah	24	66,7	63	79,7
Pernah 1 kali	6	16,7	9	11,4
Pernah 2 kali	5	13,8	4	5,1
Pernah lebih 2 kali	1	2,8	3	3,8
n = 115	36	100	79	100

Prosentase terbesar adalah responden yang tidak terlibat konflik, yaitu 66,7% dari kalangan LPF dan 79,9% dari kalangan LPN. Prosentase totalnya adalah 75,7% (87 responden). Prosentase total yang pernah terlibat konflik adalah 24,3% atau 28 responden yang terdiri atas 12 responden dari lingkungan LPF dan 16 responden dari lingkungan LPN. Lihat tabel V.53.

Tabel V.54. Konflik di lingkungan organisasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Konflik	LPF		PLN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak pernah	24	66,7	63	79,7
Pernah 1 kali	6	16,7	9	11,4
Pernah 2 kali	5	13,8	4	5,1
Pernah lebih 2 kali	1	2,8	3	3,8
n = 115	36	100	79	100

Tabel V.55. Jenis konflik di lingkungan organisasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Jenis konflik	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Permusuhan tetapi sebatas tidak saling tegur	6	50	10	62,5
Adu mulut	5	41,7	6	37,5
Adu fisik	1	8,3	-	-
Adu fisik dengan menggunakan alat	-	-	-	-
n = 28	12	100	16	100

Prosentase terbesar adalah jenis konflik yang paling lunak (bermusuhan tetapi sebatas tidak saling tegur), yaitu 50% (LPF) dan 62,5% (LPN). Sedangkan konflik yang paling keras (adu fisik dengan menggunakan alat) tidak terdapat.

Tabel V.56. Cara penyelesaian konflik di lingkungan Organisasi, menurut status lembaga pendidikan Responden.

Cara penyelesaian	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Keluargaan	10	100	14	100
Hukum	-	-	-	-
n = 24	10	100	14	100

Jalur keluargaan merupakan satu-satunya cara penyelesaian konflik, baik dari responden di lingkungan LPF maupun responden di lingkungan LPN. Namun demikian masih ada 4 responden (2 dari LPF dan 2 dari LPN).

Uraian penjelasan mengenai masalah konflik ini dapat diringkas sebagai berikut:

- (1). Sebagian besar responden tidak terlibat konflik.
- (2). Konflik terjadi baik di lingkungan pekerjaan/sekolah, maupun di lingkungan organisasi.
- (3). Sebagian besar konflik itu mengambil bentuk yang paling lunak, yaitu tidak saling tegur.
- (4). Sebagian besar konflik itu sudah diselesaikan.
- (5). Sebagian besar konflik diselesaikan secara keluargaan.

Sebagaimana diketahui, konflik adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Lewis Coser, seorang pakar sosiologi dari AS, bahkan menegaskan, bahwa sampai pada tingkat tertentu konflik memiliki fungsi positif bagi suatu sistem sosial.

Kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, yaitu nilai yang terkandung dalam butir "i" dari sila kelima. Sementara itu sebagian kecil dari responden yang terlibat konflik, berupaya untuk meredamnya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

5.4.6. "Apakah Anda anggota koperasi?"

Pertanyaan ini diramu dari butir-butir P-4 sebagai berikut:

- (1). Butir "a" dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia: "Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2). Butir "1" dari sila yang sama: "Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial".

Tabel V.57 Keanggotaan dalam koperasi, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Anggota	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
ya	24	66,7	59	74,7
tidak	12	33,3	20	25,3
n = 115	36	100	79	100

Tingkat prosentase anggota koperasi di lingkungan responden dari LPF dan LPN cukup memperlihatkan suatu perbedaan, yaitu 66,7% berbanding 74,7%. Sementara itu 12 responden (33,3%) dari kalangan LPF yang bukan anggota koperasi itu terdiri dari 8 orang siswa SLTA dan 2 orang mahasiswa. Sedangkan 20 orang responden (25,3%) dari kalangan LPN terdiri atas 9 orang pedagang pasar, 4 orang karyawan perusahaan, seorang pegawai negeri sipil, dan 6 orang siswa pesantren. Jumlah total prosentase responden yang bukan anggota koperasi adalah 27,8% (32 responden). Sedangkan prosentase responden yang menjadi anggota koperasi adalah 72,2% (83 responden).

Jika prosentase responden yang menjadi anggota koperasi ini dikaitkan dengan prosentase jawaban responden yang setuju dengan pernyataan bahwa "koperasi adalah wadah ekonomi yang mengutamakan semangat kekeluargaan dan gotong royong" yang jumlahnya 100% (lihat tabel V.23), maka dapat dikatakan bahwa keanggotaan para responden dalam koperasi bukan semata-mata karena dorongan kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan tindakan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam butir "a" dan "1" dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.4.7. "Apakah Anda menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah/pekerjaan? Apabila ya, Anda menggunakan bahasa Indonesia atas dasar pertimbangan apa?"

Pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan guna mengecek apakah bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat komunikasi dalam arena nasional. Hal itu penting untuk diketahui sebab bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia dan penggalang solidaritas nasional. Pertanyaan tersebut diramu dari butir "c" dari Sila Persatuan Indonesia: "Cinta Tanah Air dan Bangsa".

Tabel V.60 Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilingkungan Pekerjaan/Sekolah/Organisasi.

Alasan	Frekuensi	%
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi	81	70,4
Bahasa Indonesia lebih komunikatif	33	28,7
Bahasa Indonesia adalah bahasa utama responden	1	0,9
	n = 115	100

Prosentase tertinggi (70,4%) adalah responden dari kalangan LPF dan LPN yang menganggap bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional yang harus diterapkan dalam kesempatan resmi atau arena nasional. Ini berarti bahwa para responden menyadari akan penempatan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya terdapat 33 responden (28,7%) yang menggunakan bahasa Indonesia hanya sebagai alat komunikasi yang komunikatif. Namun hal ini tidak harus ditafsir secara negatif, sebab penilaian bahwa bahasa Indonesia itu komunikatif sudah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang aktif digunakan di lingkungan pekerjaan/sekolah/organisasi.

Tabel V.61. Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan pekerjaan/sekolah/organisasi, menurut status lembaga Pendidikan Responden.

Alasan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi	27	75	54	69
Bahasa Indonesia lebih komunikatif	8	22,2	25	31
Bahasa Indonesia adalah bahasa utama responden	1	2,8	-	-
n = 115	36	100	79	100

Prosentase alasan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi lebih tinggi di kalangan responden dari LPN, yaitu 75% berbanding 69%.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pola penggunaan bahasa Indonesia, Tabel V.62 di bawah ini menyajikan data tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan rumah.

Tabel V.62. Penggunaan Bahasa Indonesia di rumah.

Menggunakan Bhs Indonesia	Frekuensi	%
ya	49	42,6
tidak	66	57,4
	n = 115	100

Ternyata prosentase penggunaan Bahasa Indonesia di rumah tidak begitu jauh berbeda (meskipun lebih rendah) dari penggunaan bahasa daerah, yaitu 62,6% berbanding 57,4%. (Lihat tabel V.62).

Tabel V.63. Tingkat Intensitas Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan Rumah, menurut status Lembaga Pendidikan Responden.

Tingkat Intensitas	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Sering	2	5,6	6	7,6
Kadang-kadang	18	50	25	31,6
Tidak	16	44,4	48	60,8
n = 115	36	100	79	100

Dalam tabel V.63 tampak bahwa prosentase untuk tingkat intensitas paling tinggi ("sering") hampir tidak berbeda, yaitu 5,6% (LPF) berbanding 7,6% (LPN). Sementara itu prosentase yang tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah 44,4% (LPF) berbanding 60,8% (LPN). Prosentase tertinggi untuk responden dari kalangan LPF adalah 50%, yaitu menggunakan bahasa Indonesia secara kadang-kadang. Prosentase tertinggi untuk responden dari kalangan LPN adalah 60,8%, yaitu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Prosentase total dari responden yang sering menggunakan bahasa Indonesia di rumah hanya 7%, "kadang-kadang" sebanyak 37,4% dan yang "tidak menggunakan" sebanyak 55,6%.

Tabel V.64. Alasan Penggunaan Bahasa Indonesia di rumah, menurut status Lembaga Pendidikan para responden.

Alasan	LPF		LPN	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Menerapkan bahasa Indonesia dalam urusan resmi di rumah/ urusan kantor/organisasi	2	10	4	12,9
Agar komunikatif: tamu hanya bisa berbahasa Indonesia	4	30,8	12	38,7
Membantu anak/keponakan/Adik dalam membuat PR, berdiskusi soal pelajaran	13	65	15	48,4
Bahasa Indonesia adalah bahasa utama Responden	1	5	-	-
n = 115	20	100	31	100

Dari data dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase terbesar adalah alasan untuk "membantu anak/adik/keponakan dalam membuat PR dan berdiskusi soal pelajaran", yaitu 65% (LPF) berbanding 48,4% (LPN). Sedangkan prosentase kedua terbesar adalah alasan "agar komunikatif", yaitu sebesar 30,8% (LPF) berbanding 38,7% (LPN). Sementara itu prosentase untuk alasan "menerapkan bahasa Indonesia dalam urusan resmi di rumah" hanya 10% (LPF) berbanding 12,9% (LPN).

Dari uraian tentang penggunaan bahasa Indonesia ini dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Bahasa Indonesia terutama digunakan di lingkungan formal, (pekerjaan/ sekolah/organisasi) dengan tingkat prosentase 93,9% (lihat tabel 58).
2. Alasan utama menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi/nasional, dengan tingkat prosentase sebesar 70,4% (lihat tabel V.60).
3. Bahasa Indonesia semakin menjadi alat komunikasi yang penting sebab bahasa Indonesia juga digunakan di lingkungan kebudayaan daerah, yaitu di rumah (lihat tabel V.62 dan V.63).
4. Pentingnya Bahasa Indonesia digunakan di lingkungan kebudayaan daerah karena bahasa Indonesia merupakan akses menuju dunia pendidikan (lihat tabel V.64).
5. Meskipun bahasa Indonesia menjadi semakin penting, tetapi bahasa Indonesia tidak akan menggeser bahasa daerah. Sebab prosentase tertinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kebudayaan

daerah hanyalah 37,4% (lihat Tabel V.63). Dalam hal ini bahasa Indonesia digunakan secara kadang-kadang, khususnya sebagai sarana belajar.

6. Bukti lain bahwa bahasa Indonesia tidak akan menggusur bahasa daerah adalah pendapat responden yang 99,1% setuju terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa daerah (lihat Tabel V.32).
7. Dengan demikian bahasa daerah tetap dominan di lingkungannya sendiri, yaitu lingkungan kebudayaan daerah, atau lingkungan non-formal.

Dari uraian mengenai Dimensi psiko-motorik dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosentase jawaban positif cukup tinggi, yaitu rata-rata berkisar antara 70% hingga 90%.
2. Tingkat prosentase jawaban positif antara responden dari kedua lembaga pendidikan tersebut berimbang.
3. Tingkat pengamalan nilai-nilai moral Pancasila cukup signifikan, baik di lingkungan LPF maupun di lingkungan PLN.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pendidikan Nonformal memegang peranan yang cukup penting dalam pembinaan moral Pancasila, baik dalam dimensi kognisi, dimensi afeksi, maupun dimensi psikomotorik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moral Pancasila yang merupakan jiwa dari kebudayaan nasional, sampai pada tingkat yang cukup signifikan telah mewarnai pola pikir dan pola tindak para responden di kedua lingkungan pendidikan tersebut. Jadi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan salah satu usaha pembinaan kebudayaan nasional.

Saran.

Agar pembinaan kebudayaan nasional dilakukan dengan lebih intensif dan berkesinambungan maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan P-4 seyogyanya tidak hanya terbatas pada pranata-pranata umum nasional seperti Lembaga Pendidikan Formal (sekolah) dan kantor-kantor pemerintah saja, tetapi juga sampai pada lembaga-lembaga lain seperti pasar, perusahaan swasta dan lain-lain.
2. Senantiasa dilakukan pembinaan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti organisasi PKK, LKMD, dan instansi-instansi terkait yang relevan.

DAFTAR KEPUSTAAAN

- Alfian 1985. "Persepsi Politik tentang Kebudayaan", dalam Alfian (ed), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jakarta: PT Gramedia, hlm 154 - 168.
- Alisyahbana, S.T. 1985. "Pembahasan oleh S.T. Alisyahbana", dalam Alfian (ed), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jakarta: PT Gramedia, hlm 141 - 153.
- Bachtiar, H.W. 1983. "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian", dalam Koentjaraningrat (red.), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, hlm 108 - 128.
- Bahan Penataran 1990. Bahan Penataran : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Damono, Sapardi Djoko 1987. "Beberapa Catatan Kongres Kebudayaan I, II, & III", dalam Muhadjir (Peny), Evaluasi dan Strategi Kebudayaan, Depok: FS - VI, hlm 1 - 37.
- Djawanai, S. 1985. "Pembahasan oleh Stephanus Djawanai", dalam Alfian (ed), Persepsi masyarakat tentang Kebudayaan, Jakarta: PT Gramedia, hlm 189 - 197.
- Kartodirdjo, Sartono 1985. "Pembahasan oleh Sartono Kartodirdjo", dalam Alfian (ed), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jakarta: PT Gramedia, hlm 18 - 21.
- Kayam, Umar 1991. Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Baru. Makalah dalam Kongres Kebudayaan 1991, Jakarta 29 Oktober-3 Nopember 1991.
- Kantor Statistik Kodya. Surakarta 1990. Statistik Kotamadya Surakarta.
- Kleden, Ignas 1987. "Eufenisme Bahasa, Konsensus Sosial, dan Kreativitas Kata" dalam Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritis Kebudayaan, Jakarta: LP 3ES, hlm 248 - 258.
- Koentjaraningrat 1983. "Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling dalam Penelitian Masyarakat", dalam Koentjaraningrat (red), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, hlm 70 - 107.
1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
1983. "Metode Wawancara" Koentjaraningrat (red), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, hlm 129 - 157.

- Koentjaraningrat 1985. "Persepsi tentang Kebudayaan Nasional", dalam Alfian (ed) Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jakarta: PT Gramedia, hlm 99 - 140.
- Koentjaraningrat dan Selo Soemardjan 1983. "Penyusunan dan Penggunaan Kuesioner" dalam Koentjaraningrat (red), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, hlm 173 - 219.
- Nasinambow, E.K.M. 1985. "Perspektif kebahasaan terhadap Kebudayaan", dalam Alfian (ed), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jkt. PT Gramedia, hlm 189 - 197.
- Mengenal Kec. Jebres 1991. Dalam Angka, Kec. Jebres Kodia. Surakarta
- Silalahi, H. Tjan 1991. Pancasila sebagai Filter dan Dasar Budaya Indonesia, Makalah dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta, 29 Oktober - 3 Nopember 1991.
- Soebadio Haryati, 1991. "Mencari Akar Kebudayaan Nasional", Kongres Kebudayaan.
- Suyatno Kartodirdjo, Dr. dkk 1986/1987. Laporan Hasil Pengkajian Kebudayaan di Daerah, Bappeda Tk. I Jateng + Fakultas Sastra UNS.
- Tilaar, H.A.R. 1991. Pendidikan dan Kebudayaan Nasional: Fungsi dan Peranan SISDIKNAS dalam Pembangunan yang Berbudaya, makalah dalam Kongres Kebudayaan 1991, Jkt, 29 Oktober - 3 Nopember 1991.
- Wahid, Abdurrachman 1985. "Persepsi Gerakan Islam tentang Kebudayaan: Sebuah tinjauan Dini tentang Perkembangannya di Indonesia", dalam Alfian (ed.), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, Jkt, PT Gramedia, hlm 58 - 63.



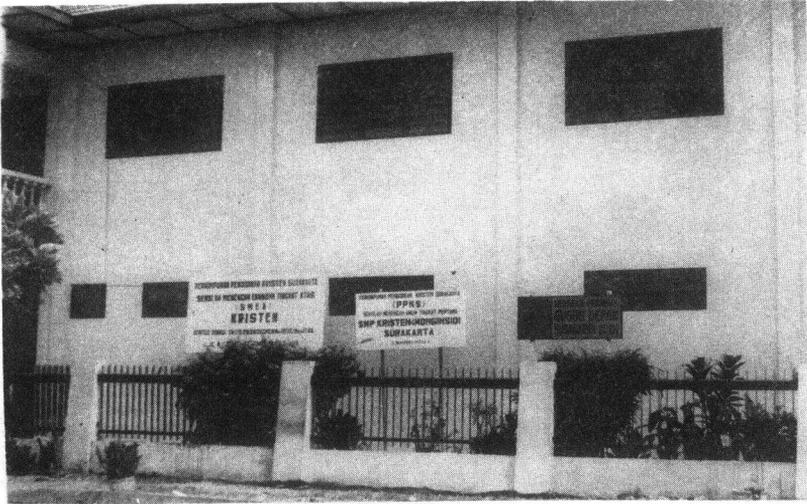
DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. BAMBANG HARYONO
Agama : Islam
Pekerjaan : Camat
Tempat/Tanggal lahir : Semarang
Alamat : Kepatihan, Jebres, Surakarta
Pendidikan : Sarjana
2. Nama : H. RUSTONO
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha batik
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta
Alamat : Gandekan Wetan, Surakarta
Pendidikan : SLTA
3. Nama : HARYONO
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Pasar Gede
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Agustus 1943
Alamat : Jl. Kutai VII/Blok A-6 Sumber, Surakarta
Pendidikan : Sarjana Muda
4. Nama : Drs ACHMAT SUMIYADI
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen STSI Surakarta
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 12 Nopember 1952
Alamat : Perumahan R.C. No. 212 Palur Karanganyar
Pendidikan : Sarjana
5. Nama : Dra. ASTITI
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SMKI
Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 30 Juli 1939
Alamat : Mutihan RT. 02 RW XII/No. 2 Sondakan Solo
Pendidikan : Sarjana
6. Nama : Drs. SRI WALUYO
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Surakarta
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No 334 Surakarta
Pendidikan : Sarjana

7. Nama : Drs. MULYOTO
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen F. Sastra UNS
Alamat : Jebres, Surakarta
Pendidikan : Sarjana

8. Nama : Dra. Siti Ngadli
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala SMKI Surakarta
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 1940
Pendidikan : Sarjana.

Foto-Foto Tempat Pendataan



Tempat Pendataan di SMP/SMEA KRISTEN Monginsidi Surakarta



Tempat Pendataan di SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA



Tempat Pendataan di UNS Surakarta.



Tempat Pendataan di STSI Surakarta.



Tempat Pendataan di Akademi Tekonologi "Warga" Surakarta.



Tempat Pendataan di Perusahaan Swasta/Textile Industry
PT. Sari Warna Asli.



Tempat Pendataan di Pasar Gede Surakarta.



Tempat Pendataan di Pesantren Djamsaren Surakarta.





8 
Perpu
Jend